



LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2022

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung ini bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas sekaligus melaporkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang menjadi tolok ukur kebertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan menjalankan misi organisasi.

Dengan telah terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 ini, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sumbu evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung di Tahun Anggaran 2022 dan untuk menjadi acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun 2023 yang akan datang.

Tanjungpandan, Meeset 2023

Kepala Dinas



KASIMIN, S.P., MAB

Pembina Tk I

NIP. 196608241990031004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.3 Isu-Isu Strategis	10
1.4 Dasar Hukum	11
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan	19
2.3 Indikator Kinerja Utama	47
2.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	48
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	48
2.6 Rencana Anggaran	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1 Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2022	52
3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja 2018-2023	54
3.3 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	57
3.4 Akuntabilitas Keuangan	112
3.5 Analisa Efisiensi	128
BAB IV PENUTUP	130
4.1 Kesimpulan Umum	131
4.2 Langkah-Langkah Perbaikan Ke Depan	131
LAMPIRAN	133

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023 tujuan dari DSPPPA adalah untuk mendukung tujuan pembangunan Bupati Belitung yaitu Tujuan pembangunan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan di Kabupaten Belitung, oleh karena itulah perlunya penjabaran rencana program dan kegiatan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 Tujuan dan 3 sasaran yang memuat 3 indikator Tujuan dan 3 Indikator sasaran pada Renstra Perubahan 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pencapaian dari 6 Indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2022 ini secara garis besar berhasil mencapai target. Hanya terdapat 1 indikator Tujuan yaitu Kabupaten Layak Anak dengan capaian 58,15% dari target 2022 sebesar 83%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2022 terdapat penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan skor KLA 581,52.

Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat 12 program, 23 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung / kegiatan sebesar Rp. 12.183.849.456,- dan Realisasi Anggaran Rp. 9.510.126.268,- atau 78,06%.

Untuk itu ada beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada masa-masa mendatang, diantaranya :

1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi baik fungsional maupun Struktural.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan publik.

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2022 ini juga merupakan bagian evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu yang akan datang.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

b. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

c. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat lihat melalui bagan struktur organisasi berikut ini:



Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial

- penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - g. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - h. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - i. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan

fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- h. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. Pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai pada Tahun 2022 sebanyak 44 orang terdiri dari 28 orang PNS, 16 Orang tenaga honorer.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan
Per 31 Desember 2022

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI						JUMLAH	
		PNS		CPNS		HONORER		L	P
		L	P	L	P	L	P		
I	TENAGA SARJANA								
1	S2 Manajemen Ekonomi Publik	1	0					1	0
2	Sarjana Sosial / Kesejahteraan Sosial / Kessos Umum	0	1					0	1
3	Sarjana Ilmu Sosial Politik	0	1					0	1
4	Sarjana Agama Islam	1	0					1	0
5	Sarjana Administrasi Negara	3	3					3	3
6	Sarjana Hukum / Ilmu Hukum	1	0					1	0
7	Sarjana Sosiologi	0	1			1	0	1	1
8	Sarjana Pekerjaan Sosial	0	1					0	1

9	D – IV Pekerja Sosial	1	0					1	0
10	Sarjana Psikologi	2	2					2	2
11	Sarjana Hubungan Internasional					0	1	0	1
12	D4 Manajemen Informatika					1	0	1	0
13	Sarjana PGSD / Penjas					2	0	2	0
Total		9	9	0	0	4	1	13	10

II	TENAGA SARJANA MUDA /AKADEMI/D3								
1	D3 Sosiatri	0	1					0	1
2	D3 Manajemen Informatika	0	2					0	2
	D3 Perpajakan	0	1					0	1
	D3 Akuntansi	0	1					0	1
3	D3 Manajemen Administrasi Perkantoran					0	1	0	1
Total		0	5			0	1	0	6
III	SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	SMA/ SMU	3	2			4	3	7	5
2	SMEA/ SMK	0	0			1	1	1	1
3	STM	0	0					0	0
4	SMKK	0	1					0	1
5	SMP	0	0			1	0	1	0
Total		3	3			6	4	9	7
JUMLAH TOTAL		12	17	0	0	10	6	22	23

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isu-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyiapan renstra.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan /Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 30. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
42. Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

43. Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada spek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran untuk mendukung visi dan misi Bupati yang sesuai tema, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun;
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS dikali 100%.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

3. Terpenuhinya Hak Anak dengan Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA);
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap anak;
4. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran :
 - Indeks kepuasan.

2.2 STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial;
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
5. Peningkatan peran anak dalam pembangunan
6. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
7. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
8. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2018 – 2023

Visi	: Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023		
Misi I	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1. Meningkatnya penanganan PMKS	1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
3. Terpenuhinya Hak Anak	1. Meningkatnya kualitas hidup Anak	1. Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan peran anak dalam pembangunan

Misi II	: Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah. 2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur	1. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.

Program

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Program Perlindungan Perempuan;
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
12. Program Perlindungan Khusus Anak.

Kegiatan

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja
- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)
- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukkan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
10. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
11. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
13. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
14. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota;

15. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
16. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota;
18. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
19. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
20. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
21. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
22. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
23. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan dan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2022.

Terdapat 48 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong pada Tahun Anggaran 2022, dijabarkan dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran terdapat dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Per tahun	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1. Penyediaan Permakanan	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial. • Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							<p>2. Penyediaan Alat bantu</p> <p>3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p> <p>4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. • Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. • Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, dan spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial sebesar 100%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS aktif Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

						<p>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p>	<p>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100%	<p>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi</p> <p>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten sebesar 100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata sebesar 100%	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
2	Terwujudnya peningkatan kualitas idup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota

						2. Advokasi Kebijakan Pelaksanaan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
						Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya organisasi perempuan
						1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan

							Kabupaten/Kota
						2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung
						1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang

							Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi dan Pendampingan
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
							Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Jumlah lembaga yang terfasilitasi

							Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani 100%	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat penguatan dan pengembangan
							1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan

					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Sebanyak 25%	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak
							1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
3.	Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak Kabupaten Belitung
							1. Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten 100%	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota

							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
							2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
							2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
						2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah
							1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

						3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
							3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah Tangga yang disediakan
							4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
							5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
							6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan
							7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

							Konsultasi SKPD	SKPD
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
							1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
							3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
						4.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
							1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik
							1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
							2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara

							3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
							4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan menjadi satu dalam pentapan Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kineja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS		Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	42,62	43,91	45,11	46,35	47,00
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	7,89	5,7	5,5	5,3	5,1

3.	Terpenuhinya hak anak		Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	75	80	83	85
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	5,0	4,8	4,6	4,4

2.4 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

Sesuai dengan Rencana Kinerja untuk satuan dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022, maka Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam format Rencana Kerja Tahunan (Renja) terlampir.

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1.1. 1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per Tahun	0,5
1.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1. 1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,35
2.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5
3.1. 1	Tujuan : Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (80%)
3.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8

2.6 RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, melalui indikator kinerja masing-masing sasaran strategis maka pada tahun anggaran 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp.3.445.918.655- Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 7.611.455.843.-

Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis per Bidang Urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Langsung per Tujuan/Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	
		2021	2022
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS	2.936.858.445	6.252.962.747
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	839.384.980	1.141.754.930
3	Tujuan: Terpenuhi hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	194.015.075	216.738.166
JUMLAH		3.970.258.500.-	7.611.455.843,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2022, Renja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
> 100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	> 90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 CAPAIAN KINERJA PD PADA TAHUN 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
			2021				2022			
1.1. 1	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	-8,79	-1758	Kurang	0,5	0.96	192,00	Sangat Baik
1.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	97,69%	122,11	Sangat Baik	80%	97,79%	123,49	Sangat Baik
2.1. 1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,11	53,02	117,53	Sangat Baik	46,35	53,02	114,39	IDG 2022 belum rilis dari BPS
2.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,5	4,13	75,09	Baik (Indikator negatif)	5,3	3,28	61,89	Baik (Indikator negatif)
3.1. 1	Tujuan : Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	80%	58,37%	72,96	Cukup	83%	58,15%	70,06	Cukup
3.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,8	1,81	37,71	Sangat baik (Indikator Negatif)	4,6	9,50	206,52	Cukup (Indikator Negatif)

3.2 Ralisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Tujuan Meningkatkan kesejahteraan PMK	Persentase penurunan PMKS per tahun	-	5,93	-5,01	-8,79	0,96		1186	1002	- 1758	192,00	
1.2 Sasaran Meningkatkan Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS yang Tertangani	73,85	83,89	94,78	97,69	98,79		104,86	118,48	122,11	123,49	
2.1 Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,27	43,07	53,11	53,02	53,02		101,06	120,95	117,53	114,39	
2.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	8,17	3,09	4,13	3,28		103,55	54,21	75,09	61,89	

3.1 Tujuan Terpenuhi ya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	60,9	60,9	58,37	58,15		87	81,20	72,96	70,06	
3.1 Sasaran Meningkatn ya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	2,84	1,81	9,5		-	56,8	37,71	206,52	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022
Berdasarkan Persentase

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	4

Dengan demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yakni :

- Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan capaian 58,15% dari target 83%, mendapat predikat pratama. Nilai capaian ini didapat dari penilaian mandiri yang diverifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 dan memperoleh skor 581,52.
- Pervalensi kekerasan anak dengan capaian 9,50 jauh di atas target 4,6 di tahun 2022. Target ini merupakan target negatif, dimana anak yang memerlukan perlindungan khusus meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 15 orang menjadi 50 orang di tahun 2022.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang melebihi target yaitu :

- Indikator persentase penurunan PMKS per tahun dengan capaian 0,96 dari target 0,5. Terdapat penurunan jumlah PMKS dari tahun sebelumnya.

- Indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian 98,79% dari target 80%. Indikator ini memuat dari jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS keseluruhan (26 jenis PMKS) dikali 100%
- Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IDG tahun 2022 masih menggunakan nilai IDG tahun 2021 yaitu 53,02 dari target 46,35, dikarenakan untuk nilai IDG tahun 2022 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- Indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan, dengan capaian 3,28 dari target 5,3 dan merupakan indikator negatif. Sesuai yang diharapkan, kasus kekerasan terhadap perempuan menurun dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan kategori maka capaian kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.6

**Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Tahun 2022
Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	> 90	4
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	2
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.5 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang pada Tahun 2022 berada pada kategori “Sangat Baik”(capaian >90) yang dicapai pada 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup. Dengan demikian jika dilihat dari kategori yang ada secara umum kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang berada dalam kategori “Baik”.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian (Target), tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat Keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Keberhasilan dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya rencana tingkat capaian (target) baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun Sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang ditandatangani tanggal Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang ditandatangani tanggal 17 Oktober 2022 telah ditetapkan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1. 1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per Tahun	0,5
1.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1. 1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,35
2.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan	5,3
3.1. 1	Tujuan : Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (83%)
3.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung

Tujuan 1 Strategis 1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS Meningkatnya penanganan PMKS	2 indikator
Tujuan 2 Strategis 2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Meningkatnya kualitas hidup perempuan	2 indikator
Tujuan 3 Strategis 3	Terpenuhinya hak anak Meningkatnya kualitas hidup anak	2 indikator

Dengan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 4 (empat) indikator tercapai melebihi target, 2 (dua) indikator belum tercapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Tujuan Strategis 1	1	192,00	Tercapai melebihi target
2	Sasaran Strategis 1	1	123,49	Tercapai melebihi target
3	Tujuan Strategis 2	1	114,39	Tercapai melebihi target
4	Sasaran Strategis 2	1	61,89	Tercapai melebihi target (Indikator negatif)
5	Tujuan Strategis 3	1	70,06	Belum tercapai
6	Sasaran Strategis 3	1	206,52	Belum tercapai (Indikator negatif)

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam kategori Baik untuk semua indikator baik pada indikator tujuan maupun indikator sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1	Tujuan Strategis 1	1	192,00					√
2	Sasaran Strategis 1	1	123,49					√

3	Tujuan Strategis 2	2	114,39	√
4	Sasaran Strategis 2	1	61,89	√ (Indikator negatif)
5	Tujuan Strategis 3	1	70,06	√
6	Sasaran Strategis 3	1	206,52	√ (Indikator negatif)

Tujuan/Sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan PMKS

Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan PMKS

Tujuan Strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. Persentase penurunan PMKS per tahun; target pada tahun 2022 adalah 0,5 di Kabupaten Belitung.
2. Persentase PMKS yang tertangani, pada tahun 2022 ditargetkan 80% di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 1 dan sasaran 1 tahun 2022, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 157,75% dan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Persentase penurunan PMKS Per tahun %	0,5	-8,79	0,5	0,96	-1758	192,00
2	Sasaran : Persentase penanganan PMKS %	80%	97,69%	80%	98,79%	122,11	123,49
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						940,06	157,75

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS, dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun dan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase penanganan PMKS tahun 2021 adalah sebesar 940,06% dan tahun 2022 sebesar 157,75%, menurun dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Persentase penurunan PMKS Per tahun	%	-8,79	0,96	-7,83	
2	Persentase penanganan PMKS	%	97,69%	98,79%	1,1	

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

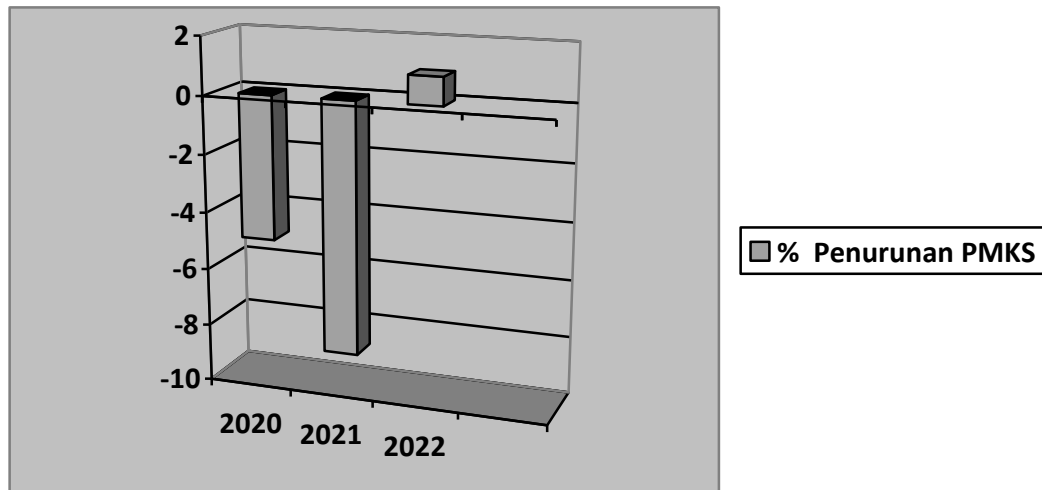
Tabel 3.13.

Pencapaian Tujuan/ Sasaran Persentase Penurunan PMKS per Tahun

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2022 terhadap Target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Persentase penurunan PMKS Per tahun	-8,79	0,5	0,96	192	0,5	192
2	Persentase penanganan PMKS	97,69	80	98,79	123,49	80	123,49

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase penurunan PMKS per tahun



Grafik 3.1. Persentase penurunan jumlah PMKS

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan jumlah PMKS” dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, nilai minus disini dimaksudkan PMKS tidak mengalami penurunan pertahunnya (jumlah PMKS meningkat) dan nilai positif dimaksudkan menurunnya jumlah PMKS dari tahun sebelumnya. Untuk jumlah PMKS tahun 2020 jumlah PMKS sebesar 13.631, tahun 2021

jumlah PMKS sebesar 14.829 (meningkat dari tahun sebelumnya), dan tahun 2022 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu 14.686.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu $(\text{Jumlah PMKS tahun } n-1 - \text{Jumlah PMKS tahun } n) / \text{Jumlah PMKS tahun } n-1 \times 100\%$. Maka didapatlah nilai minus 5,01 untuk tahun 2020, minus 8,79 untuk tahun 2021, dan 0,96 ditahun 2022.

Terjadinya peningkatan jumlah PMKS di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya dampak pandemi Covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama untuk fakir miskin. Seiring dengan meredanya dampak pandemi covid di Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah PMKS, hal ini juga tentunya tidak terlepas dari fokus dan anggaran penanganan PMKS di Kabupaten Belitung terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan PMKS.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMKS, terjalinnya Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS, adanya SDM yang kompeten di bidang sosial, dan tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang sosial, masih terjadinya ego sektoral di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase PMKS yang tertangani.

2) Persentase PMKS yang tertangani

Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.14**Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS**

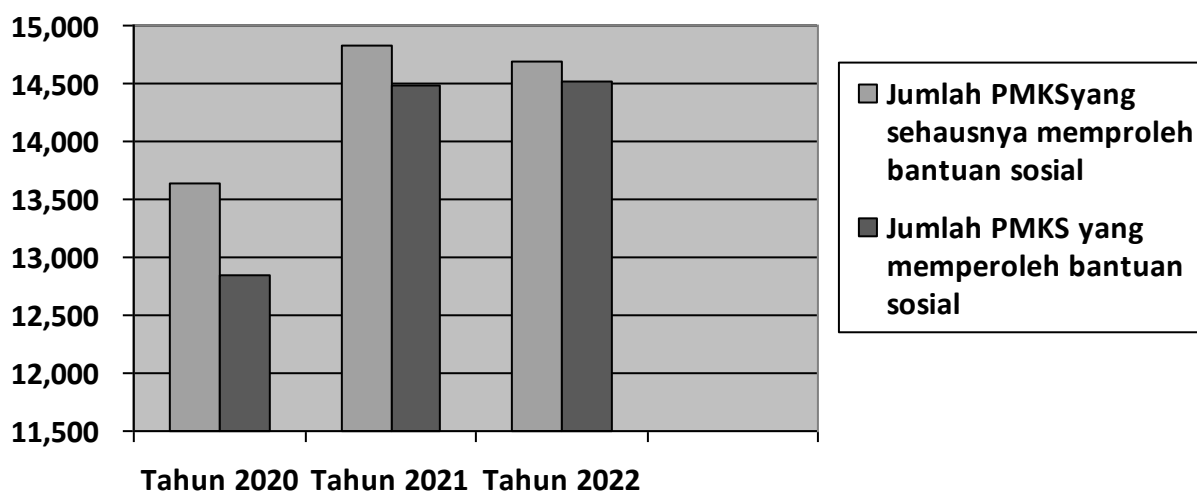
Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan social	%
2020	13.631	12.841	94,20%
2021	14.829	14.487	97,69%
2022	14.685	14.509	98,79%

Pada tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa dari pelayanan dan penanganan PMKS dalam 3 tahun terakhir meningkat persentasenya.

Jumlah PMKS pada tahun 2020 menurun yaitu 13.631 orang yang memperoleh bantuan sosial menjadi 12.841 dari sebelumnya 14.337 orang atau sebesar 94,20%. Dan ditahun 2021 jumlah PMKS kembali meningkat sebesar 14.829 dan jumlah tertangani sebesar 14.487 dengan persentase meningkat penanganan PMKS meningkat 3,49% menjadi 97,69%. Dan ditahun 2022 jumlah PMKS kembali menurun sebesar 14.685 dan jumlah tertangani sebesar 14.509 dengan persentase penanganan PMKS meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya menjadi 98,79%. Persentase penanganan PMKS juga dapat digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :

Grafik 3.2.

**Persentase PMKS skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2020 – 2022**



Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa penanganan PMKS meningkat dari tahun sebelumnya yaitu meningkat 3,49% tahun 2021 dan 1,1% ditahun 2022. Meningkatnya penanganan PMKS ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti.

Dengan meningkatnya pemberian bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayanan SPM maka persentase penanganan PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam capaian Tujuan/ Sasaran ini yaitu data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana. Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan verifali data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Tabel 3.15.

**Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu
berdasarkan jenis PMKS Tahun 2020 - 2021**

No	Jenis PMKS	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	0	0	0.00	71	71	100.00	71	71	100.00
2	Anak Terlantar	244	144	59.02	219	219	100.00	86	86	100.00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	6	6	100.00	15	15	100.00	5	5	100.00
4	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	43	10	23.26	37	12	32.43	37	37	100.00
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	9	9	100.00	10	10	100.00	8	8	100.00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	6	6	100.00	15	15	100.00	50	50	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	993	85.38	1163	1163	100.00	1154	1154	100.00
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	612	125	20.42	612	295	48.20	612	435	71.08
10	Tuna Susila	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-	0	0	-	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00	16	16	100.00	16	16	100.00

17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00	6	6	100.00	4	4	100.00
18	Korban Trafficking	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	28	28	100.00	40	40	100.00	32	32	100.00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	18	18	100.00	12	12	100.00	13	13	100.00
21	Korban Bencana Alam	11	11	100.00	32	32	100.00	16	16	100.00
22	Korban Bencana Sosial	8	8	100.00	17	17	100.00	2	2	100.00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	n/a	n/a	0.00	1096	1096	100.00	1096	1096	100.00
24	Fakin Miskin	11463	11463	100.00	11463	11463	100.00	11463	11463	100.00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0.00	5	5	100.00	21	21	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah		13631	12841	94.20	14829	14487	97.69	14686	14509	98.79

Capaian Tujuan/Sasaran 1 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Pencapaian Indikator Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	100	-

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tahun 2022 sebesar 100% dimana jumlah penyandang disabilitas 30 orang, anak terlantar 86 orang, lansia terlantar 1154 orang, gelandangan dan pengemis 13 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 1.283 orang dari 1.283 orang. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus dalam penanganan PMKS terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial.

Namun terkait dengan mutu layanan SPM pada aplikasi e-spm tidak mencapai 100% karena tidak semua penerima layanan SPM menerima dan memerlukan layanan sesuai dengan 15 kriteria yang ditetapkan.

Faktor Pendorong: Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar minimal kepada Masyarakat, Amanat Peraturan Perundang-undangan.

Faktor Penghambat: Rendahnya komitmen dalam pemenuhan pelayanan minimal, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasional

dalam penanganan PMKS, data PMKS yang belum valid dan keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial.

Solusi yang dilakukan adalah

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2023.
- 2) Memverifikasi dan verifikasi data PMKS secara berkala.
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Rehabilitasi Sosial adalah sebesar Rp. 559.157.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 473.578.624,- setara dengan 84,70% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 490.180.600,- dan realisasi sebesar Rp. 462.154.917,- atau setara dengan 94,28%. Output kegiatan adalah jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Faktor Pendorong: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang memerlukan pelayanan dasar minimal).

Faktor Penghambat: Terbatasnya jenis layanan yang disediakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.138.700,- dan realisasi sebesar Rp. 216.277.703,- atau setara dengan 98,69%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: Tidak terpenuhinya standar gizi bagi penerima layanan / PPKS.

Faktor Penghambat: Belum terpenuhinya standar jumlah dan kualitas barang bantuan sesuai dengan standar gizi minimal yang diperlukan oleh seseorang.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.572.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.049.600,- atau setara dengan 88,85%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: Banyaknya Penyandang Disabilitas yang membutuhkan akses alat bantu.

Faktor Penghambat: terbatasnya tenaga ahli untuk memberikan akses alat bantu sesuai dengan kebutuhan.

- c. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.939.050,- dan realisasi sebesar Rp. 140.531.750,- atau setara dengan 97,63%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat: Keterbatasan anggaran.

- d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.530.850,- dan realisasi sebesar Rp. 69.295.864,- atau setara dengan 80,08%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat: Terbatasnya anggaran.

- (2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.976.440,- dan realisasi sebesar Rp. 11.423.707,- atau setara dengan 16,56%. *Output* kegiatan adalah Persentase

PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti.

Faktor Pendorong: Banyaknya masyarakat yang memerlukan layanan Rumah Singgah dan Pemulangan bagi Pekerja Migran Terlantar kembali ke daerah asalnya.

Faktor Penghambat: belum tersedianya Tim Reaksi Cepat dalam penanganan PPKS, tidak tersedianya kendaraan mobilisasi jangkauan layanan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.993.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.447.500,- atau setara dengan 35,00%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental tergantung dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani, tergantung dari jumlah PMKS terlantar yang diberikan permakanan (orang terlantar/ pekerja migran terlantar di Kabupaten Belitung).

Faktor Pendorong: Adanya kebutuhan penyediaan permakanan bagi Pekerja Migran / Orang Terlantar.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya Rumah Singgah/Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan / Anggaran ini bersifat antisipatif bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dalam kondisi sakit dan memerlukan jasa pengobatan bagi yang tidak memiliki atau tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Anggaran disediakan walaupun tidak digunakan, sebagai wujud standar pelayanan minimal.

Faktor Pendorong: Adanya kebutuhan penyediaan perbekalan kesehatan bagi Pekerja Migran / Orang Terlantar.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya Rumah Singgah/Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial.

- c. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.983.440,- dan realisasi sebesar Rp. 8.976.207,- atau setara dengan 19,11%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini Sifat antisipasi untuk PMKS terlantar. Tahun ini jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya, sehingga biaya uang saku ataupun biaya pengiriman, sspd bagi PMKS terlantar tidak direalisasikan.

Faktor Pendorong: Adanya Pekerja Migran yang mengalami Keterlantaran di Kabupaten Belitung yang akan dipulangkan ke daerah asalnya.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya Rumah Singgah/Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial di Kabupaten Belitung.

2. Program Penanganan Bencana

Indikator Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Untuk pencapaian indikator Program Penanganan Bencana pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Pencapaian Indikator Program Penanganan Bencana Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	-

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten tahun 2022 yaitu 100%. Dimana jumlah korban bencana yang terjadi di tahun 2022 yaitu 18 korban bencana (16 korban bencana alam dan 2 korban bencana sosial).

Faktor Pendorong: Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar minimal kepada Korban Bencana, Amanat Peraturan Perundang-undangan. Faktor Penghambat : Terbatasnya Anggaran.

Alokasi anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 445.395.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 402.359.450,- setara dengan 90,34% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 445.395.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 402.359.450,- atau setara dengan 90,34%. *Output* kegiatan adalah korban bencana yang menerima bantuan sosial. *Outcome* kegiatan terlayannya korban bencana.

Faktor Pendorong: Adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulangan bencana

Faktor Penghambat: Standar Operasional Pelayanan Kebencanaan yang belum terintegrasi.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 445.395.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 402.359.450,- atau setara dengan 90,34%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: Dapat dilaksanakannya koordinasi serta simulasi kebencanaan.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya anggaran dan peralatan kebencanaan yang memadai.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial. Untuk pencapaian indikator Program Pemberdayaan Sosial pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	-	-	-	100	42,14	42,14	Indikator program ini tahun 2021 adalah Persentase PSKS
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	90	90	-	-	-	

Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial tahun 2022 sebesar 42,14% di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100%. Persentase ini didapatkan dari rumus jumlah penerima program pemberdayaan sosial 8740 KK (Data BPNT) dibagi jumlah penduduk miskin 20.742 (Data DTKS) dalam dikali 100 persen. Bisa diartikan hanya 42,14 persen dari jumlah penduduk miskin yang dibantu dengan program BPNT yang merupakan program dan kuota bantuan dari Pusat.

Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 3.887.579.047,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.273.292.575,- setara dengan 58,48% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.887.579.047,- dan realisasi sebesar Rp. 2.273.292.575,- atau setara dengan 58,48%. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah PSKS yang aktif.

Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan ini kurang dari 80% karena dipengaruhi oleh kegiatan atau sub kegiatan realisasinya kurang dari 80% dan

penjelasannya ada di point sub kegiatan.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifali data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.205.985,- dan realisasi sebesar Rp. 129.669.465,- atau setara dengan 85,76%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : adanya tenaga pendamping/SDM program BPNT dan PKH yang terlatih, tersedianya anggaran yang memadai, meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat/KPM terkait pemanfaatan bantuan pemerintah

Faktor penghambat : tenaga pendamping/SDM program yang mengundurkan diri karena suatu kepentingan.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.536.713.017,- dan realisasi sebesar Rp. 1.962.453.360,- atau setara dengan 55,49%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi tidak mencapai 80% dikarenakan Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu (Bantuan kepada keluarga yang terdampak inflasi). Penerima bantuan merupakan keluarga yang terdampak inflasi bukan sebagai PNS, TNI, POLRI, Karyawan BUMN/BUMD dan keluarga yang tidak

menerima bantuan BPNT/ Sembako, PKH, BLT, BBM, BLT Dana Desa. Target penerima bantuan direncanakan 3.677 KPM. Data calon penerima bantuan yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan 2.359 KPM (data hasil verifikasi dan validasi PSM Desa dan Kelurahan). Dari data 2.359 KPM tersebut, bantuan yang dapat dibayarkan oleh PT. POS Indonesia Cabang Tanjungpandan adalah sebesar 2.047 KPM (312 KPM yang tidak dibayarkan). Faktor pendukung : tersedianya anggaran yang memadai, tersedianya jaringan internet yang baik sehingga mendukung jalannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Faktor penghambat : berkurangnya jumlah penerima uang penghargaan, masih kurangnya pemahaman penggunaan SPSE, masih minimnya anggaran uang penghargaan yang tersedia.

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.340.450,- dan realisasi sebesar Rp. 112.043.250,- atau setara dengan 92,34%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : tersedianya anggaran yang memadai.

Faktor penghambat : masih adanya desa/ kelurahan dan kecamatan yang belum memperbaharui kepengurusan karang taruna, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif oleh karang taruna desa/ kelurahan.

- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.319.595,- dan realisasi sebesar Rp. 69.126.500,- atau setara dengan 88,26%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsultasi masalah keluarga ke lembaga-lembaga seperti LK3, tersedianya anggaran yang memadai.

Faktor penghambat : masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan lembaga untuk konsultasi masalah keluarganya.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Pencapaian Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	83,01	83,01	100	97,25	97,25	-

Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial tahun 2022 sebesar 97,25% dari target 100%. Indikator program ini di dapat dari rumusan jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial yang berasal dari data PBI berjumlah 43.701 dibagi jumlah jiwa dalam DTKS berjumlah 44.935 dikali 100%.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 97,25%. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 426.311.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 420.185.855,- setara dengan 98,56% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 426.311.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 420.185.855,- atau setara dengan 98,56%. *Output* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. *Outcome* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : aplikasi siks-ng yang sudah online sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan datanya sedangkan faktor penghambat : masih

ada PSM yang belum memiliki perangkat komputer untuk pengelolaan data dan jaringan yang sering lemot.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 426.311.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 420.185.855,- atau setara dengan 98,56%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong : aplikasi siks-ng yang sudah online sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan datanya sedangkan faktor penghambat : masih ada PSM yang belum memiliki perangkat komputer untuk pengelolaan data dan jaringan yang sering lemot.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam Pahlawan yang tertata.

Untuk pencapaian indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang Tertata	90	90	100	100	100	100	-

Taman Makam Pahlawan yang tertata tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100%. Persentase ini juga merupakan indikator program pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini didapatkan dari rumus jumlah Taman Makam Pahlawan yang tertata yaitu 1 TMP yang terletak di Desa Perawas dengan nama Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai berikut : Taman Makam pahlawan yang tertata sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 6.721.660,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.584.560,- setara dengan 53,33% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.721.660,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.584.560,- setara dengan 53,33%. *Output* kegiatan adalah telaksananya pengelolaan taman makam pahlawan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya taman makam pahlawan. penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.721.660,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.584.560,- setara dengan 53,33%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota. Realisasi sub kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Terdapat rekening belanja (antisipasi/ persiapan) yang tidak dapat direalisasikan berupa Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Jasa Pemakaman Jenazah di TMP sebanyak 1 makam senilai Rp. 2.500.000,- **Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya (pembuatan karangan bunga). Belanja tidak dapat direalisasikan berupa pembuatan 1 (satu) karangan bunga senilai Rp. 650.000,-.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Tujuan / Sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Tujuan Strategis 2 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, target pada tahun 2022 adalah 46,35 di Kabupaten Belitung
2. **Prevalensi kekerasan terhadap perempuan**, target pada tahun 2022 adalah 5,3 di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 2 dan sasaran 2, dengan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2022 diperoleh rata-rata nilai capaian 92,39% dan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	43,91	53,02	46,35	53,02 (masih gunakan data 2021, IDG tahun 2022 belum rilis dari BPS)	120,74	114,39
2	Sasaran :	5,5	4,13	5,3	3,28	75,96	61,89

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan						(Indikator negatif)
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					98,35	92,39

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 2 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas hidup perempuan adalah sebesar 92,39% dengan Rata-rata capaian kategori sangat baik. Terdapat indikator sasaran Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang capaian kerjanya 3,28, namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, maka target capaian indikator ini semakin sedikit kasus kekerasan terhadap perempuan maka semakin baik capaiannya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
Dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,02	53,02	-	Data 2022 memakai data 2021, (Data 2022 belum rilis dari kementerian / BPS)
2.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		4,13	3,28	0,85	Indikator Negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24 Pencapaian Tujuan/ Sasaran
IDG dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

No.	Indikator Kinerja	Realiasi	Tahun 2022	Target	Capaian 2022
-----	-------------------	----------	------------	--------	--------------

		2021	Target	Realisasi	Capaian dalam %	Akhir Renstra (2023)	terhadap target akhir Renstra 2023
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,02	46,35	53,02	114,39	47,00	112,81
2.	Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan	4,13	5,3	3,28	61,89 (Indikator negatif)	5,10	64,13

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

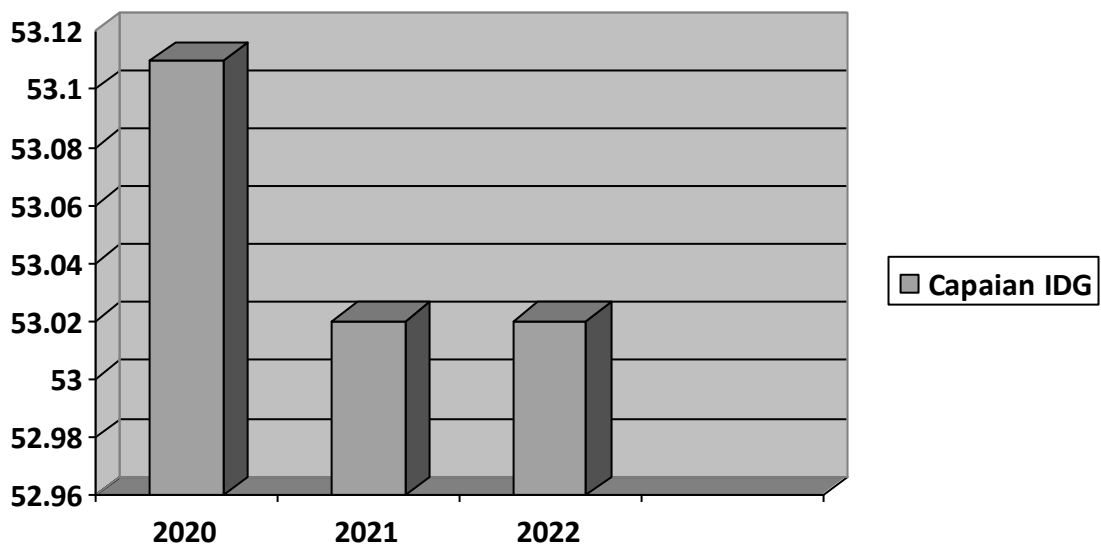
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 datanya belum tersedia baik di BPS maupun di Provinsi, untuk nilai tersebut tahun 2022 masih mengambil data IDG tahun sebelumnya yaitu 53,02. IDG ini diperoleh dari rumusan Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang datanya bersumber di BPS dan Profil Data Gender. Untuk tahun 2022, IDG masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai, serta perlunya koordinasi dengan BPS ataupun DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja dari indikator ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.3. IDG Tahun 2020,2021 dan 2022

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan indikator IDG data 2022 belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Nilai capaian IDG Belitung tahun 2021 menurun dikarenakan dampak pandemi covid 19 yang menyebabkan berdampak ke semua sektor terutama ekonomi, sosial, politik, pariwisata, dll. Dampak pandemi covid 19 juga menyebabkan banyaknya pelaku industri perempuan yang tidak berproduksi dikarenakan kurangnya permintaan pasar, daya beli masyarakat rendah dan aktivitas ekonomi menurun.

Untuk mencapai tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

2) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

Untuk mengukur kualitas hidup perempuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio korban kekerasan perempuan yaitu dihitung dari Jumlah kekerasan perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan > 18 tahun dikali 10.000. Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan namun masih di bawah target (indikator negatif).

Tabel 3.25

Rasio perempuan korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2022

Tahun	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Penduduk Perempuan >18 tahun	Capain dikali 10.000	Target Capaian
2020	27	87.296	3,09	5,7
2021	37	89.476	4,13	5,5
2022	30	91.366	3,28	5,3

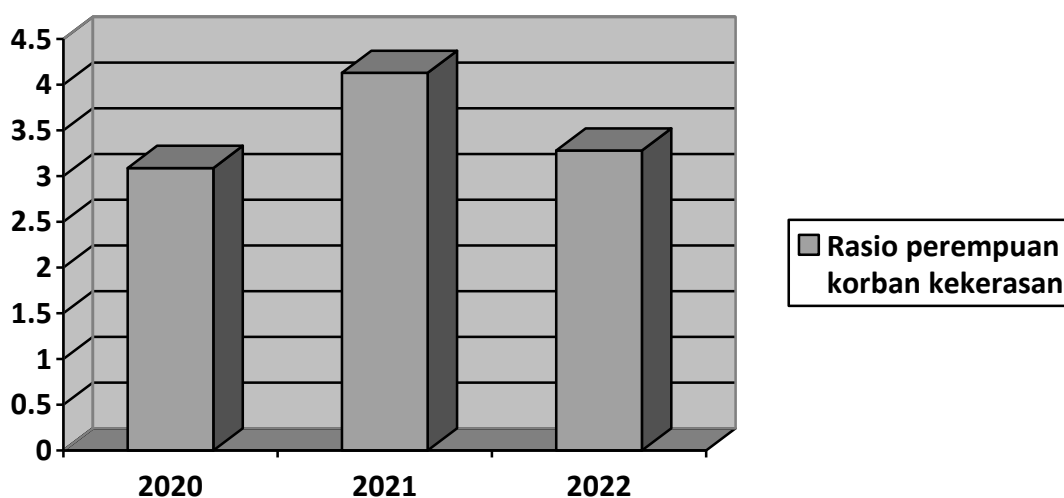
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perempuan korban kekerasan meningkat tahun 2021 dan menurun kembali tahun 2022, namun capaiannya masih di bawah target indikator negatif.

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2022 sebesar 3,28 lebih kecil dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 5,3 dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten Belitung Tahun 2021 dan 2022 masih diambang batas target. Prevalensi ini didapat dari rasio perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 10000. Jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2022 adalah 30 orang, menurun dari tahun 2021 yang berjumlah 37 orang.

Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.4

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 – 2022



Prevalensi kekerasan menurun menunjukkan bahwa upaya pencegahan memiliki dampak kepada kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun angka prevalensi kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Data jumlah kasus dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain.

Capaian Tujuan/Sasaran 2, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Untuk pencapaian indikator ini pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Pencapaian Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,3	3,73	70,38	0,5	35,75	7150	-

Capaian indikator kinerja Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2022 yaitu 35,75% diatas target sebesar 0,5%. Nilai diperoleh dari rumusan jumlah anggaran yang responsive gender seluruh Perangkat Daerah Rp. 347.468.708.361,- dibagi jumlah anggaran Belanja Langsung APBD 971.844.385.804,- dikali 100%. Jika dibandingkan dengan target, persentase realisasi pencapaian indikator ini meningkat sebesar 7150% jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai persentase ARG 0,27%. Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) meningkat drastis dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dampak dari dilaksanakan Bimtek PPRG pada Bulan November tahun 2022 dengan narasumber dari Kementerian PPA yang pesertanya adalah Perencana OPD, baru dipahami kegiatan/ sub kegiatan yang termasuk ARG pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah. Semua kegiatan yang tidak memihak salah satu jenis kelamin adalah ARG. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya ARG pada Perangkat Daerah banyak yang nihil karena ketidakpahaman mana ARG dan non ARG.

Alokasi anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar Rp. 850.033.630,- dengan realisasi sebesar Rp. 324.257.269,- setara dengan 35,44% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.434.480,- dan realisasi sebesar Rp21.384.012,- atau setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya kebijakan PUG.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.929.680,- dan realisasi sebesar Rp. 5.901.050,- atau setara dengan 99,52%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.504.800,- dan realisasi sebesar Rp. 15.482.962,- atau setara dengan 99,86%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 814.270.500,- dan realisasi sebesar Rp288.533.107,- atau setara dengan 35,44%. *Output* kegiatan adalah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyara Terfasilitasinya organisasi perempuan. *Outcome* kegiatan yaitu meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 529.584.725,- dan realisasi sebesar Rp. 17.709.300,- atau setara dengan 3,34%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi sub kegiatan kurang dari 80% dimana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan tidak maksimal sebab terdapat belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu (Dana Insentif Daerah/ DID Kinerja Tahun 2022) sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai modal usaha bagi pelaku Industri Rumah Tangga Perempuan, dan terkait dengan waktu pelaksanaannya yang singkat serta nomenklatur terkait bantuan sosial dan bantuan ekonomi kepada masyarakat miskin harus disesuaikan dengan aturan-aturan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan bantuan ekonomi yang ada. Dan untuk pelaksanaan tersebut harus dilakukan verifikasi dan validasi data (verval) data yang masuk serta bantuan sosial dan bantuan sosial ekonomi kepada individu. Dengan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) harus membuat proposal pengajuan penambahan modal usaha sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan industri rumah tangga yang telah disediakan.
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284.685.775,- dan realisasi sebesar Rp. 270.843.807,- atau setara dengan 95,14%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.328.650,- dan realisasi sebesar

Rp 14.320.150,- atau setara dengan 99,94%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.328.650,- dan realisasi sebesar Rp 14.320.150,- atau setara dengan 99,94%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Indikator program Perlindungan Perempuan adalah persentase layanan perlindungan perempuan.

Untuk pencapaian indikator program perlindungan perempuan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Pencapaian Indikator Program Perlindungan Perempuan
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	100	100	100	100	100	100	-

Persentase layanan perlindungan perempuan tahun 2022 yaitu 100%. Indikator ini didapatkan dari rumusan jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor 24 orang sama dengan jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan dikali 100%. Jumlah kasus kekerasan perempuan yang melapor menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 38 kasus perempuan.

Pravelensi kekerasan menurun menunjukkan bahwa upaya pencegahan memiliki dampak kepada kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun angka pravelensi kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Alokasi anggaran Program Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 222.633.055,- dengan realisasi sebesar Rp. 191.942.025,- setara dengan 84,84% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut :
 Persentase layanan perlindungan perempuan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 222.633.055,- dengan realisasi sebesar Rp. 191.942.025,- setara dengan 86,21% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.875.288,- dan realisasi sebesar Rp. 27.558.200,- atau setara dengan 95,44%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya layanan perlindungan perempuan.

Faktor pendukung kegiatan antara lain adalah :

- Terkoordinasinya Lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kerjasama-kerjasama dan pertemuan lintas sector.
- Pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang baik.
- Telah terbetuknya UPT PPA yang berperan utama pada pencegahan Bersama dengan Lembaga-lembaga lintas sector lainnya.
- Kegiatan yang dilaksanakan mengangkat issue-issue yang menjadi perhatian masyarakat.

Faktor penghambat kegiatan antara lain adalah :

- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Belitung.
- Keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan ruang lingkup kegiatan pencegahan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.875.288,- dan realisasi sebesar Rp. 27.558.200,- atau setara dengan 95,44%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 193.757.767,-

dan realisasi sebesar Rp. 164.383.825,- atau setara dengan 84,84%. *Output* kegiatan adalah jumlah lembaga yang terfasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan perempuan.

Faktor pendukung yaitu adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan.

Faktor penghambat yaitu Kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas sebagai pelaksana pelayanan yang terlatih. Dan terbatasnya dan terpengkasnya sumber dana anggaran diakibatkan dampak dari pandemic, yang menyebabkan terbatasnya ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.767.100,- dan realisasi sebesar Rp. 116.983.825,- atau setara dengan 92,28%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.990.667,- dan realisasi sebesar Rp. 47.400.000,- atau setara dengan 70,76%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi Sub Kegiatan ini dibawah 80% dimana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan tidak maksimal sebab anggaran yang tersedia hanya untuk penanganan kasus, dan tergantung jumlah kasus yang ditangani bilamana ada kasus yang dapat direalisasikan.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah Persentase keluarga yang terlayani.

Untuk pencapaian indikator program peningkatan kualitas keluarga pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28

Pencapaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	-	-	-	100	100	100	-

Persentase keluarga yang terlayani tahun 2022 yaitu 100%. Indikator ini didapatkan dari jumlah keluarga yang melapor dan memerlukan pelayanan dibagi jumlah keluarga yang dilayani dikali 100%. Jumlah keluarga yang melapor yaitu 3 keluarga, dan dilayani keseluruhannya. Indikator ini muncul dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 DSPPPA tidak melaksanakan program ini.

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut : persentase keluarga yang tertangani sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah sebesar Rp. 27.260.825,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.228.225,- setara dengan 85,21% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.260.825,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.228.225,- setara dengan 85,21%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang

mendapat penguatan dan pengembangan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan keluarga.

Faktor pendorong :

- Adanya kerjasama yang baik dengan pihak terkait (OPD Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, LK3) dalam mewujudkan efektivitas pelayanan peningkatan kualitas keluarga.
- Adanya SDM Konselor, Psikolog yang memadai dalam layanan peningkatan kualitas keluarga.

Faktor penghambat :

- Sarana dan prasarana yang masih terbatas/ belum memadai.
- Belum adanya/ tersedianya call center khusus untuk masyarakat melakukan komunikasi langsung di Puspaga / Layanan Keluarga.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.260.825,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.228.225,- setara dengan 85,21%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Untuk pencapaian indikator program pengelolaan sistem data gender dan anak pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender
dan Anak Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)	25	33,33	133,33	25	55,80	223,20	-

Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) tahun 2022 sebesar 55,8% lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu 25%. Capaian indikator ini didapat dari Komponen data gender dan anak yang terpenuhi dibagi jumlah komponen data SIGA dikali 100%. Dari 43 komponen data SIGA baru 24 komponen yang terpenuhi atau sekitar 55,8% Faktor penghambat, adanya OPD yang belum memahami tentang pentingnya data gender dan anak, sehingga diperlukan Bimtek atau pelatihan-pelatihan khusus mengenai Pemenuhan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut : Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebesar 55,80%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah sebesar Rp. 41.827.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.225.856,- setara dengan 89,00% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.827.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.225.856,- setara dengan 89,00%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data gender dan anak . *Outcome* kegiatan adalah data terpilah dan informasi gender yang akurat. Capaian indikator tersebut didukung melalui koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan,

pengolahan, analisis dan menyajikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.827.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.225.856,- setara dengan 89,00%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/ Kota yang tersedia.

Tujuan/Sasaran strategis 3

Tujuan 3 : Terpenuhi Hak Anak

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas hidup anak

Tujuan Strategis 3 Terpenuhi Hak Anak; Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas hidup anak dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Kabupaten Layak Anak (KLA)**, yang targetnya pada tahun 2022 adalah Pratama 83% di Kabupaten Belitung
2. **Prevalensi kekerasan terhadap anak**, pada tahun 2022 ditargetkan 4,6 di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 3 dan sasaran 3, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 70,33% dan termasuk kategori Baik (terdapat indikator negatif).

Tabel 3.30**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Terpenuhinya Hak Anak	80	58,73	83	58,15	75,09	70,06
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup anak	4,8	1,81	4,6	9,50	37,71	206,52
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						56,40	138,29

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 3 Terpenuhinya hak anak dan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas hidup anak tahun 2022 adalah sebesar 138,29%. Untuk capaian indikator Kabupaten Layak anak tahun 2022 dilaksanakan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh predikat Pratama. Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2021	2022		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	58,73	70,06	11.33	
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	1,81	9,50	7,69	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.32
Pencapaian Tujuan/ Sasaran
KLA dan Prevalensi Kekerasan terhadap anak

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	58,37	83	58,15	70,06	85	68,41
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	1,81	4,6	9,50	206,52	4,40	215.91

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk setiap indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1) Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kebijakan KLA sudah dimulai sejak tahun 2006. Sementara, pada Tahun 2019, Kabupaten Belitung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pratama dengan skor perolehan Penilaian Mandiri sebesar 609. 93.

Pengembangan KLA di setiap Kabupaten/Kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni

- (1) Hak sipil dan kebebasan;
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- (5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu Predikat Pratama. Skor Capaian KLA dari Kementerian PPA RI tahun 2021 yaitu 583,7 point dan tahun 2022 yaitu 581,52 point. Tingkat KLA berdasarkan Evaluasi KLA adalah KLA Tingkat Pratama (nilai 500 – 600), KLA Tingkat Madya (nilai 601 – 700), dan KLA Tingkat Nindya (nilai 701 – 800). Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator

KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Solusi kedepan antara lain adalah :

1. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif menyuarakan aspirasi anak.
2. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.
3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
4. Pemerintah perlu membuat sistem pengelolaan data secara khusus untuk mengintegrasikan data anak.
5. Pemerintah perlu mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan

Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
- b. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
- c. Penguatan komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan
- d. Memperbaiki kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.
- e. Meningkatkan kapasitas anggaran desa demi mewujudkan desa/kelurahan layak anak.

2) Prevalensi kekerasan terhadap anak

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap anak didapat dari rumusan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk tahun 2022 dengan nilai sebesar 9,50 yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus berjumlah 50 orang (terdiri dari 8 anak korban kekerasan, 37 anak dengan disabilitas, dan 5 anak

yang berhadapan dengan hukum), meningkat dibanding tahun 2021 berjumlah 15 orang.

Jumlah anak korban kekerasan mengalami kenaikan dari tahun lalu. Hal ini menjadi catatan bahwa upaya untuk pencegahan anak menjadi korban kekerasan perlu ditingkatkan. Layanan terhadap anak-anak dengan perlindungan terus dilakukan dan upaya-upaya terhadap pencegahan juga terus dilakukan. Adapun indikator prevalensi perlindungan anak adalah anak dengan masalah hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS dan lain-lain.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Hambatan yang dialami antara lain adalah kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus, koordinasi yang belum sinergis antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu permasalahan pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Adapun capaian Tujuan/Sasaran 3 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Program Pemenuhan Hak Anak adalah Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.

Indikator ini diperoleh dengan melihat skor penilaian KLA. Dimana untuk tahun 2022 dilaksanakan penilaian mandiri dan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh nilai status KLA Pratama dengan skor 581,52.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 70,06%

Untuk pencapaian indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Pencapaian Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	80	58,37	72,96	750 Point	581,52 Point	77,54	-

Pada perolehan penilaian KLA tersebut ada beberapa poin penting yang belum dilaksanakan untuk memenuhi indikator pemenuhan hak anak ini, yaitu :

1. Belum tersedia kebijakan terkait dengan Informasi Layak Anak.
2. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
3. Masih tingginya angka pernikahan anak.
4. Belum tersedia SDM di Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang telah mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak.
5. Belum tersedia Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan merata di seluruh desa dan kelurahan.
6. Belum banyak terbentuk kerjasama dari Dunia Usaha dan Media untuk melakukan promosi dan kampanye tentang Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7. Belum banyak tersedia fasilitas untuk anak disabilitas.
8. Belum kuatnya implementasi dari Kawasan Tanpa rokok.
9. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sesuai dengan standar.
10. Belum tersedianya Rumah Ibadah ramah Anak
11. Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan perlindungan anak.

Strategi yang dilakukan :

1. Memperkuat peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
3. Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungannya secara terus menerus kepada masyarakat.

Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA. Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut : Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 190.401.171,- dengan realisasi sebesar Rp. 184.599.426,- setara dengan 96,95% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.828.383,- dan realisasi sebesar Rp. 10.757.151,- atau setara dengan 90,94%. *Output* kegiatan adalah tercapainya peningkatan status kla. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap anak.

Faktor pendorong kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.828.383,- dan realisasi sebesar Rp. 10.757.151,- atau setara dengan 90,94%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.572.788,- dan realisasi sebesar Rp. 173.842.275,- atau setara dengan 97,35%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya forum anak kabupaten belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan terhadap anak.

Faktor pendorong kegiatan antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.572.788,- dan realisasi sebesar Rp. 173.842.275,- atau setara dengan 97,35%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Program Perlindungan Khusus Anak adalah persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 100%

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan Khusus Anak pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34
Pencapaian Indikator Program Perlindungan Khusus Anak
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	-

Indikator persentase penanganan anak korban kekerasan didapat dari rumusan jumlah anak korban kekerasan/ jumlah anak korban kekerasan yang ditangani x 100%.

Persentase penanganan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2022 yaitu 100 persen, dengan jumlah anak korban kekerasan sebanyak 8 orang. Dan semua kasus yang masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga lainnya ditangani 100%.

Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten. Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 26.336.995,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.068.675,- setara dengan 95,18% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.336.995,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.068.675,- setara dengan 95,18%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yg tersedia di Desa.
 2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.
- Faktor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.635.195,- dan realisasi sebesar Rp. 19.110.825,- atau setara dengan 97,33%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.701.800,- dan realisasi sebesar Rp. 5.957.850,- atau setara dengan 88,90%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%
- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan target 75%
- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah dengan target 100%.
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%

Untuk pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31

Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	-
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	77,33	103,11	75	78,70	104,93	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah tahun 2022 sebesar 100 persen. Indikator ini merupakan program rutin sekretariat. Yang mencakup tersedianya dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan maupun dokumen keuangan lainnya.
2. Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah tahun 2022 sebesar 78,70% lebih besar dari target 75%. Indeks ASN ini diperoleh dari perhitungan oleh BKPSDM daerah yang bekerja sama dengan OPD.
3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tahun 2022 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa administrasi dan pelayanan umum kantor.
4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tahun 2022 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD DSPPPA.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.500.191.063,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.308.730.111,- setara dengan 93,65% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau setara dengan 100%. *Output* kegiatan adalah Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 100%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 100%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.575.393.613,- dan realisasi sebesar Rp. 4.313.635.384,- atau setara dengan 94,28%. *Output* kegiatan adalah dokumen keuangan perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.572.393.613,- dan realisasi sebesar Rp. 4.310.635.584,- atau setara dengan 94,28%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 99,86%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

(3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.131.850,- atau setara dengan 99,99%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.150.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 18.131.850,- atau setara dengan 99,90%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 342.836.050,- dan realisasi sebesar Rp. 341.976.400,- atau setara dengan 99,75%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah *Outcome* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.999.500,- atau setara dengan 99,99%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.434.800,- dan realisasi sebesar Rp. 56.049.600,- atau setara dengan 99,32%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.997.800,- atau setara dengan 99,98%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.061.250,- dan realisasi sebesar Rp. 102.890.000,- atau setara dengan 99,83%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.700.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 43.699.500,- atau setara dengan 99,99%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.640.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.340.000,- atau setara dengan 94,68%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 113.000.000,- atau setara dengan 100%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

(5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.385.100,- dan realisasi sebesar Rp. 37.125.000,- atau setara dengan 87,59%. *Output* kegiatan adalah Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.385.100,- dan realisasi sebesar Rp. 37.125.000,- atau setara dengan 87,59%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.484.300,- dan realisasi sebesar Rp. 220.529.716,- atau setara dengan 96,52%. *Output* kegiatan

adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.683.400,- atau setara dengan 56,11%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi kurang dari 80% dimana, hanya direalisasikan sesuai dengan pengiriman surat dan jasa surat yang lain menggunakan media elektronik.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.955.316,- atau setara dengan 89,15%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.084.300,- dan realisasi sebesar Rp. 165.891.000,- atau setara dengan 99,88%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya.
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 286.942.000,- dan realisasi sebesar Rp. 213.405.378,- atau setara dengan 74,37%. *Output* kegiatan adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
- Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 139.323.778,- atau setara dengan 66,74%. *Output* sub kegiatan

adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Sub Kegiatan ini realisasi kurang dari 80%, dimana kegiatan ini sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan tidak maksimal sebab sebagai efisiensi anggaran, kendaraan tersebut secara keseluruhan telah dilaksanakan pemeliharaan.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.240.000,- atau setara dengan 74,67%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara. Realisasi Sub Kegiatan ini dibawah 80%, kegiatan ini telah dilaksanakan namun realisasi keuangan tidak maksimal disebabkan masih kurangnya alat kantor dan rumah tangga – alat rumah tangga – mebel.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.640.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.486.600,- atau setara dengan 85,43%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.552.000,- dan /realisasi sebesar Rp. 53.355.000,- atau setara dengan 99,63%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. 8.037.103.543,- dan perubahannya sebesar Rp. 12.183.849.456,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.510.126.268,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 78,06%. Komposisi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk tahun 2022, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Komposisi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2021 - 2022

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp) 2021	Realisasi Belanja (Rp) 2021	2021 %	Anggaran Belanja(Rp) 2022	Realisasi Belanja(Rp) 2022	2022 %
1	Belanja Tidak Langsung	4.575.065.888	4.571.888.849	96,85	4.572.393.613	4.310.635.584	94,28
2	Belanja Langsung	3.970.258.500	3.155.140.887	80,99	7.611.455.843	5.199.490.684	68,31
Jumlah		8.545.324.388	7.727.029.736	90,42	12.183.849.456	9.510.126.268	78,06

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran tahun 2022.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capaian target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2021 - 2022

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.133.719.188	5.377.236.288	5.308.730.111	98,73	5.442.146.988	5.500.191.063	5.150.803.728	93,65
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.839.200	5.839.200	5.820.200	99,67	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	2.994.000	99,80	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.839.200	2.839.200	2.826.200	99,54	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.233.832.088	4.578.045.088	4.574.863.849	99,93	4.594.184.888	4.575.393.613	4.313.635.384	94,28
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.230.852.888	4.575.065.888	4.571.888.849	99,93	4.591.184.888	4.572.393.613	4.310.635.584	94,28
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.979.200	2.979.200	2.975.000	99,86	3.000.000	3.000.000	2.999.800	99,99

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	18.150.000	18.150.000	18.131.850	99,90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	18.150.000	18.150.000	18.131.850	99,90
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.195.900	293.500.000	246.961.853	84,14	316.185.800	342.836.050	341.976.400	99,75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	9.000.000	8.920.000	99,11	7.000.000	7.000.000	6.999.500	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.246.900	88.227.500	87.522.800	99,20	56.434.800	56.434.800	56.049.600	99,32
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	14.000.000	13.967.800	99,77	14.000.000	14.000.000	13.997.800	99,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.051.000	104.374.500	81.806.250	78,38	101.304.000	103.061.250	102.890.000	99,83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.398.000	28.398.000	28.383.800	99,95	43.700.000	43.700.000	43.699.500	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	4.500.000	4.500.000	4.420.000	98,22	4.500.000	5.640.000	5.340.000	94,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000	45.000.000	21.941.203	48,76	89.247.000	113.000.000	113.000.000	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	42.385.100	37.125.000	87,59
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	42.385.100	37.125.000	87,59
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.550.000	219.550.000	213.908.409	97,43	220.084.300	288.484.300	220.529.716	96,52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.950.000	2.950.000	2.140.000	72,56	3.000.000	3.000.000	1.683.400	56,11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	51.600.000	46.768.009	90,64	51.600.000	51.600.000	52.955.316	89,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	165.000.000	100	166.084.300	166.084.300	165.891.000	99,88
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.302.000	280.302.000	267.175.800	95,32	286.942.000	286.942.000	213.405.378	74,37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.750.000	126.750.000	114.812.800	90,58	208.750.000	208.750.000	139.323.778	66,74
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	2.240.000	74,67

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.420.000	27.420.000	26.393.000	96,25	21.640.000	21.640.000	18.486.600	85,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.132.000	126.132.000	125.970.000	99,87	53.552.000	53.552.000	53.355.000	99,63
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		575.220.985	487.712.385	307.212.400	62,99	471.878.335	3.887.579.047	2.273.292.575	58,48
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		575.220.985	487.712.385	307.212.400	62,99	471.978.335	3.887.579.047	2.273.292.575	58,48
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	219.690.475	158.929.475	139.931.410	88,05	159.905.985	151.205.985	129.669.465	85,76
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103.104.800	236.570.350	99.997.550	42,27	79.365.500	3.536.713.017	1.962.453.360	55,49
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	163.483.100	24.574.200	9.693.250	39,44	144.069.300	121.340.450	112.043.250	92,34

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88.942.610	67.638.600	57.590.190	85,14	88.646.550	78.319.595	69.126.500	88,26

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	789.007.350	644.553.400	578.843.599	89,81	625.971.340	559.157.040	473.578.624	84,70
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	526.988.950	464.772.500	439.143.710	94,49	536.520.400	490.180.600	462.154.917	94,28
Penyediaan Permakanan	210.666.800	210.666.800	203.930.330	96,80	217.349.200	219.138.700	216.227.703	98,69
Penyediaan Alat Bantu	54.992.500	54.992.500	54.655.000	99,39	69.727.000	40.572.000	36.049.600	88,85
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	132.000.000	132.000.000	126.500.000	95,83	146.747.800	143.939.050	140.531.750	97,63
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	129.329.650	67.113.200	54.058.380	80,55	102.701.400	86.530.850	69.295.864	80,08
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	262.018.400	179.113.200	139.699.889	77,71	89.450.940	68.976.440	11.423.707	16,56
Penyediaan Permakanan	7.012.500	5.775.900	2.722.500	47,14	8.662.500	6.993.000	2.447.500	35,00

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	-	-	-	20.605.000	15.000.000	-	0,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	255.005.900	174.005.900	136.977.389	78,72	60.183.440	46.983.440	8.976.207	19,11
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		408.296.850	408.210.800	402.431.275	98,58	341.561.650	426.311.650	420.185.855	98,56
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		408.296.850	408.210.800	402.431.275	98,58	341.561.650	426.311.650	420.185.855	98,56
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.296.850	408.210.800	402.431.275	98,58	341.561.650	426.311.650	420.311.650	98,56
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		589.324.860	589.319.860	537.086.356	91,14	445.395.900	445.395.900	402.359.450	90,34
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		589.324.860	589.319.860	537.086.356	91,14	445.395.900	445.395.900	402.359.450	90,34
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	589.324.860	589.319.860	537.086.356	91,14	445.395.900	445.395.900	402.359.450	90,34
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		4.891.600	4.891.600	2.064.500	42,21	6.721.660	6.721.660	3.584.560	53,33
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		4.891.600	4.891.600	2.064.500	42,21	6.721.660	6.721.660	3.584.560	53,33
	Pemeliharaan Taman Makam	4.891.600	4.891.600	2.064.500	42,21	6.721.660	6.721.660	3.584.560	53,33

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	338.965.440	284.039.940	243.508.900	85,73	260.255.075	850.033.630	324.257.269	35,44
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	34.604.850	21.434.480	21.384.012	99,76
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	-	-	-	18.800.050	5.929.680	5.901.050	99,52
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	-	-	15.804.800	15.804.800	15.482.962	99,86
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	211.321.575	814.270.500	288.553.107	35,44
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	-	-	17.721.500	529.584.725	17.709.300	3,34

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	-	-	193.600.075	284.685.775	270.843.807	95,14
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		338.965.440	284.039.940	243.508.900	85,73	14.328.650	14.328.650	14.320.150	99,94
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	338.965.440	284.039.940	243.508.900	85,73	14.328.650	14.328.650	14.320.150	99,94
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		476.573.400	511.202.709	177.144.950	34,65	126.767.100	222.633.055	191.942.025	84,84
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		-	52.230.000	51.775.350	99,13	-	28.875.288	27.558.200	95,44
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	52.230.000	51.775.350	99,13	-	28.875.288	27.558.200	95,44

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	476.573.400	458.972.700	125.369.600	27,32	126.767.100	193.757.767	164.383.825	84,84
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	476.573/400	82.827.700	78.458.600	93,73	126.767.100	126.767.100	116.983.825	92,28
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	376.145.000	46.911.000	12,47	-	66.990.667	47.400.000	70,76
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	27.260.825	27.260.825	23.228.225	85,21
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	27.260.825	27.260.825	23.228.225	85,21
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	-	-	-	-	27.260.825	27.260.825	23.288.225	85,21

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/ Kota								
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		44.142.340	44.142.340	34.491.420	78,14	42.727.420	41.827.420	37.225.856	89,00
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		44.142.340	44.142.340	34.491.420	78,14	42,727,420	41,827.420	37.225.856	89,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.142.340	44.142.340	34.491.420	78,14	42,727,420	41,827.420	37.225.856	89,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		302.953.100	128.231.550	78.376.100	61,12	239.615.450	190.401.171	184.599.426	96,25
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		25.093.000	25.093.000	4.508.925	17,97	30.803.000	11.828.383	10.757.151	90,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.093.000	25.093.000	4.508.925	17,97	30.803.000	11.828.383	10.757.151	90,94
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		277.860.100	103.138.550	73.867.175	71,62	208.812.450	178.572.788	173.842.275	97,35

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	228.751.800	87.032.700	68.095.925	78,24	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.516.850	10.516.850	5.771.250	54,88	-	-	-	-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.591.450	5.589.000	-	-	-	-	-	-
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	208.812.450	178.572.788	173.842.275	97,35
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	69.055.925	65.783.525	57.140.125	86,86	6.701.800	26.336.995	25.068.675	97,33
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.055.925	65.783.525	57.140.125	86,86	6.701.800	26.336.995	25.068.675	97,33

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.511.825	58.239.425	51.379.275	88,22	-	19.635.195	19.110.825	97,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.544.100	7.544.100	5.760.850	76,36	6.701.800	6.701.800	5.957.850	88,90
T O T A L	8.732.151.038	8.545.324.288	7.727.029.736	90,42	8.037.103.543	12.183.849.456	9.510.126.268	78,06

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 12.183.849.456,- dengan 12 Program, 23 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.510.126.268,- dan Persentase terhadap total Anggaran 78,06%.

Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2022 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2021 dan 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	2021				2022			
		Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	7.511.924.333	7.136.368.341	95,00	2	10.825.356.360	8.723.804.792	80,59
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup Perempuan	2	893.384.980	455.145.270	54,22	2	1.141.754.930	576.653.375	50,51

3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	194.015.075	135.516.225	69,85	2	216.738.166	209.668.101	96,74
Jumlah		6	8.545.324.388	7.727.029.736	99,39	6	12.183.849.456	9.510.126.268	78,06

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran		% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%		Realisasi	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	940,06	7.136.368.241	95,00	157,75	8.723.804.792	80,59
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	2	96,41	455.145.270	54,22	92,39	576.653.375	50,51

3	Tujuan: Terpenuhi hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	56,40	135.516.225	69,85	138,29	209.668.101	96,74
	Jumlah	6	346,29	7.727.029.736	90,42	129,47	9.510.126.268	78,06

ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan/sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 1 (satu) dari 3 (tiga) tujuan/sasaran menunjukkan pencapaian >100% dan 2 (dua) tujuan/sasaran lainnya dengan pencapaian <100%.

Tabel 3.39

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS	2	940,06	85,62	854,44	157,75	80,59	77,16
2.	Tujuan: Terpenuhi hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	-	-	-	138,29	96,74	41,55
	Total	4	940,06	85,62	854,44	147,02	88,67	58,35

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pencapaian Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan Sasaran: Meningkatkan penanganan PMKS adalah sebesar 77,16%. Dan efisiensi penggunaan anggaran untuk tujuan terpenuhinya hak anak dan sasaran meningkatkan kualitas hidup anak adalah sebesar 41,55%.

Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 walaupun belum tercapai namun dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata capaian dari 6 (enam) Indikator Kinerja adalah 90,42%. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 diselenggarakan secara sinergi melalui Program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 7) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 8) Program Perlindungan Perempuan
- 9) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 10) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 11) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 12) Program Perlindungan Khusus Anak.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022, yang diharapkan akan

dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dalam pelaksanaan program dapat menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan nantinya terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

2. LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sepanjang Tahun 2022, agar lebih meningkat ditahun selanjutnya adalah :

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2023,
- 2) Memverifikasi dan Verifikasi data PMKS secara berkala,
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek,
- 4) Menguatkan peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
- 5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
- 6) Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungna secara terus menerus kepada masyarakat.

Laporan Kinerja sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan diharapkan bisa memberi masukan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun dan disampaikan atas perhatian terima kasih.

Tanjungpandan, Maret 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Belitung,



KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA 2022

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

CAPAIAN KINERJA DSPPPA TAHUN 2022

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 28 April 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG

H. SAHANI SALEH, S.Sos


Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penanganan PMKS per tahun	8,5 -
2	Meningkatnya Pemangasan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	10% -
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,35 -
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,7 -
5	Terpecahnya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	83,00% -
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6 -

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 471.978.335	APBD
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 471.978.335	APBD
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 625.971.540	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelombang Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 536.520.400	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 89.450.940	APBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 341.561.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 341.561.650	APBD
D.	Pemangasan Bencana	Rp. 445.385.900	APBD
1	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.385.900	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 6.721.660	APBD
1	Pembelajaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.660	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 260.255.875	APBD
1	Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 34.664.850	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 211.321.575	APBD
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.228.650	APBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 222.633.055	APBD

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	181.777.767	APBD, DAK NON FISIK
H.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.268.825	APBD
1	Pengantian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KD dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.268.825	APBD
I.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	42.727.420	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	42.727.420	APBD
J.	Pemenuhan Hak Anak (PHAK)	Rp.	239.615.458	APBD
1	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	30.803.000	APBD
2	Pengantian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	208.812.458	APBD
K.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	36.336.945	APBD
1	Pengantian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	36.336.945	APBD, DAK NON FISIK
L.	Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.442.146.988	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.594.184.888	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	18.150.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	316.185.800	APBD
5	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	220.684.300	APBD
6	Pembelian Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	286.942.000	APBD
JUNTAH		Rp.	6.152.694.693	


 W. H. SAIFULLAH SALEH, S.Sos


 Tanjungpandan, 28 April 2022
 W. KASIMEN, S.I.P., MAB
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690341996031004



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 28 April 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,
KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

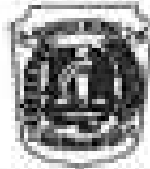
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NOL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kejajharaan PMKS	Pemertuaan pemertuan PMKS pertahun	0,5
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,75
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	5,3
5	Terpebihnya Hak Anak	KIA (Kabupaten Layak Anak)	83,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase kekerasan terhadap anak	4,6

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 471.978.335	APBD
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 471.978.335	APBD
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 625.971.348	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelombang Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 536.520.000	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 89.450.940	APBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 341.561.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 341.561.650	APBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. 445.395.900	APBD
1	Penyediaan Fasilitas Penanganan Masyarakat terhadap Kedarifanaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.395.900	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 6.721.660	APBD
1	Pencibaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.660	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 360.355.075	APBD
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 34.604.850	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 211.531.575	APBD
3	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.228.650	APBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 332.633.855	APBD

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Kondisi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	183.757.767	APBD, DAK NON FISIK
H.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.268.825	APBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam melayani KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.268.825	APBD
I.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	42.727.420	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	42.727.420	APBD
J.	Penemuan Hak Anak (PHA)	Rp.	239.615.450	APBD
1	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	30.800.000	APBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	208.812.450	APBD
K.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	26.336.995	APBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.442.146.988	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.594.184.888	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	18.150.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	316.185.800	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	220.684.700	APBD
6	Pencelupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	286.942.000	APBD
JUMLAH		Rp.	8.152.604.693	





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG

H. SAHANI SALEH, S.Sos



KASIMIN, S.IP, MAB

Pembina Tk. I

NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

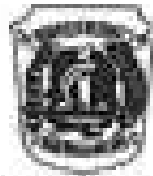
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase pemenuhan PMKS pertahun	0,5 -
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80% -
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,53 -
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,3 -
5	Terpenuhiya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	81,00% -
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	6,6 -

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. ✓ 1.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inklusif
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inklusif
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. ✓ 559.157.049	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Programis di Luar Panti Sosial	Rp. 490.189.600	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 68.978.449	APBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. ✓ 426.311.650	APBD
1	Pengumpulan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 426.311.650	APBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. ✓ 445.395.900	APBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.395.900	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. ✓ 6.721.600	APBD
1	Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.600	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. ✓ 338.170.485	APBD
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 21.634.489	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 390.407.375	APBD
3	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.328.621	APBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. ✓ 221.603.955	APBD, DAK NON FISIK

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	193.757.767	APBD, DAK NON FISIK
H.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.268.825	APBD
1	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam memajukan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.268.825	APBD
I.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	41.827.428	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Proyeksi Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.827.428	APBD
J.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	190.481.171	APBD
1	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	11.828.583	APBD
2	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	178.572.788	APBD
K.	Perlindungan Kelas Anak	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
1	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Menerima Perlindungan Kelas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L.	Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.508.091.083	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.373.393.613	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	18.150.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	342.816.050	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Daerah	Rp.	42.383.100	APBD
6	Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	228.484.300	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	286.542.000	APBD
Jumlah		Rp.	11.671.986.331	√


 BUPATI BILITUNG,
 H. SAHANI SALEH, S.Sos


 Bilitung, 13 Oktober 2023
 KABUPATEN BILITUNG
 KASIMIN, S.IP, MAB
 Pembina Tk. I
 NIP. 196508241990031004



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos

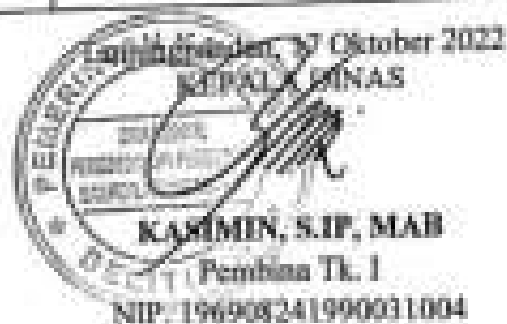
Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,
KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase pemantauan PMKS pertahun	0,5
2	Meningkatnya Pemanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,32
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3,3
5	Terpelekatnya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	83,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inflasi
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inflasi
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 490.180.000	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 490.180.000	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 0	APBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 426.311.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 426.311.650	APSD
D.	Pemanganan Bencana	Rp. 445.395.000	APBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.395.000	APSD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 6.721.600	APBD
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.600	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 338.178.405	APSD
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 21.434.480	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 302.407.275	APBD
3	Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.338.650	APBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 112.633.055	APBD, DAK NON FISK

1	Pencegahan Kebiasaan Infusiday Perangai Lingkap Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.873.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Rajukan Lanjutan bagi Perangai Korban Kekerasan yang memerlukan Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	193.257.767	APBD, DAK NON FISIK
II. Program Peningkatan Kualitas Keluarga				
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam merencanakan RG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.268.825	APBD
2	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	21.268.825	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.827.420	APBD
2	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	41.827.420	APBD
1	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	190.481.171	APBD
1	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	11.828.383	APBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	178.572.788	APBD
K. Perlindungan Khusus Anak				
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.336.995	APBD, DAK NON FISIK
2	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	28.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L. Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	8.000.191.063	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	8.000.000	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	6.575.393.615	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	18.150.000	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Daerah	Rp.	342.856.050	APBD
6	Pengadaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	42.385.100	APBD
7	Pengadaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	228.484.300	APBD
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	286.542.000	APBD
JUMLAH		Rp.	11.671.986.231	





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 8 November 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,

KASIMIN, S.IP, MAB
Bembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Pemenuhan pemenuhan PMKS pertahun	6,5
2	Meningkatnya Peningkatan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	48,15
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3,3
5	Terpecahinya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	83,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. ✓ 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inflasi
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inflasi
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. ✓ 569.157.048	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 490.180.600	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 68.976.448	APBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. ✓ 426.311.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 426.311.650	APBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. ✓ 445.395.980	APBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.395.980	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. ✓ 6.721.668	APBD
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.668	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. ✓ 593.173.638	APBD, BID Kinerja 2022
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 21.434.480	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Komunitas Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 557.418.580	APBD, BID Kinerja 2022
3	Pengisian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.328.638	APBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. ✓ 221.633.055	APBD, DAK NON FISIK

1	Peningkatan Keamanan terhadap Perceptions Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Rajakan Lanjutan bagi Perceptions Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Keswadayaan Kabupaten/ Kota	Rp.	193.757.767	APBD, DAK NON FISIK
II.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.260.825	APBD
1	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.260.825	APBD
I.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	41.827.420	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Keberagaman Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.827.420	APBD
J.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	190.401.171	APBD
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Keswadayaan Kabupaten/ Kota	Rp.	11.828.303	APBD
2	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Keswadayaan Kabupaten/ Kota	Rp.	178.572.788	APBD
K.	Pertindungan Khusus Anak	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
1	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Pertindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L.	Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.500.191.063	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.575.395.613	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	18.150.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	342.836.050	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Daerah	Rp.	42.385.100	APBD
6	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	228.484.300	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	286.942.000	APBD
JUMLAH		Rp.	11.926.989.456	

BUPATI BELITUNG

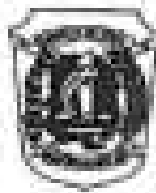
H. SAHANI SALEH, S.Sos

November 2022

KASIMIN, S.I.P, MAB

Pembina Tk. I

NIP. 196908241990031004



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 8 November 2022



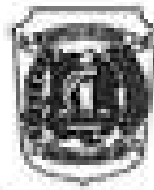
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Penertakan pemantauan PMKS pertahun	0,3
2	Meningkatnya Pemantauan PMKS	Penertakan (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,33
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3,3
5	Terwujudnya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	83,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.881.579.047	APBD, Bantuan Sosial Bermanfaat Infasi
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.881.579.047	APBD, Bantuan Sosial Cermah Infasi
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 599.187.640	APBD
1	Schabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 490.180.600	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Kochan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 68.976.400	APBD
C.	Perencanaan dan Jaminan Sosial	Rp. 426.111.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 426.111.650	APBD
D.	Pesangakan Bekerja	Rp. 443.395.900	APBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kebutuhan Bicara Kabupaten/ Kota	Rp. 443.395.900	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 6.721.660	APBD
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.660	APBD
F.	Penguatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 593.173.630	APBD, DID Kinerja 2022
1	Pelaksanaan Penguatan Gender (PLG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 21.404.490	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 551.416.500	APBD, DID Kinerja 2022
3	Pengatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.328.650	APBD
G.	Perubahan Perempuan	Rp. 112.631.055	APBD, DAK NON FISEK

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Refleksi Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	193.757.767	APBD, DAK NON FISIK
H.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.260.825	APBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam menwujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.260.825	APBD
L.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	41.827.420	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Keberagaman Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.827.420	APBD
J.	Pemertahan Hak Anak (PHA)	Rp.	190.401.171	APBD
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	11.828.303	APBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	178.572.768	APBD
K.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.500.191.063	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.575.393.613	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	18.150.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	342.836.050	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Rp.	42.285.100	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	228.484.300	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	286.542.000	APBD
JUMLAH		Rp.	11.926.989.456	





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 14 Desember 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,
KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

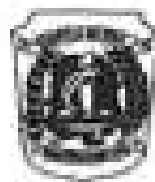
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DELITUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS tahunan	0,5
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,15
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,3
5	Terpecahinya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	81,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inflasi
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dampak Inflasi
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 559.157.040	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 490.180.600	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 68.976.440	APSD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 426.311.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 426.311.650	APBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. 445.395.900	APBD
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.395.900	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 6.721.660	APBD
1	Perawatan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.660	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 850.053.630	APBD, DID Kinerja 2022 Periode 1 dan 2
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 21.434.480	APSD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Komunitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 814.270.500	APBD, DID Kinerja 2022 Periode 1 dan 2
3	Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.328.650	APSD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 222.433.055	APBD, BAK NON FISIK

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	193.737.767	APBD, DAK NON FISIK
II.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.360.825	APBD
1	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.360.825	APBD
L.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	41.827.428	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.827.428	APBD
J.	Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Rp.	198.488.171	APBD
1	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	15.828.383	APBD
2	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	178.372.788	APBD
K.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	28.336.995	APBD, DAK NON FISIK
1	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L.	Penasjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.500.191.063	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.575.393.613	APBD
3	Administrasi Kepegawaian	Rp.	18.150.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	342.856.058	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urusan Daerah	Rp.	42.385.100	APBD
6	Penyediaan Jasa Pemasangan Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	228.484.300	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	286.942.000	APBD
JUMLAH		Rp.	12.183.849.456	





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 14 Desember 2022

Pihak Kedua,
BUPATI-BELITUNG,


H. SAHANI SALEH, S.Sos


Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,
KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I

NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keajaiban PMKS	Persentase penurunan PMKS tahunan	8,5
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,33
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,3
5	Terpelewatnya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	83,00%
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dengan Inflasi
1	Pengembangan Potensi Sumber Keajaiban Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.887.579.047	APBD, Bantuan Sosial Dengan Inflasi
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 559.157.040	APBD
1	Rehabilitasi Sosial Dinar Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipatif Sosial	Rp. 490.180.600	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keajaiban Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partisipatif Sosial	Rp. 68.976.440	APBD
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 426.311.650	APBD
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Capaian Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 426.311.650	APBD
D.	Penanganan Bencana	Rp. 445.395.900	APBD
1	Penyediaan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 445.395.900	APBD
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 6.721.600	APBD
1	Pembelajaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 6.721.600	APBD
F.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 858.033.630	APBD, DID Kinerja 2022 Periode 1 dan 2
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 21.434.480	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 814.270.500	APBD, DID Kinerja 2022 Periode 1 dan 2
3	Pengisian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.328.650	APBD
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 122.633.055	APBD, DAK NON FISIK

I	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkap Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	28.875.288	DAK NON FISIK
2	Penyediaan Layanan Bujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kerjasama Kabupaten/ Kota	Rp.	193.757.767	APBD, DAK NON FISIK
H.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.260.823	APBD
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KD dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	27.260.823	APBD
L.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	41.807.420	APBD
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Keberagaman Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.807.420	APBD
J.	Promesahan Hak Anak (PHA)	Rp.	190.485.171	APBD
1	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kerjasama Kabupaten/ Kota	Rp.	11.828.383	APBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kerjasama Kabupaten/ Kota	Rp.	178.572.788	APBD
K.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	26.336.995	APBD, DAK NON FISIK
L.	Penasjng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.980.191.062	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.575.293.613	APBD
3	Administrasi Kependudukan	Rp.	18.158.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	142.836.050	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemasng Urusan Daerah	Rp.	42.385.100	APBD
6	Penyediaan Jasa Pemasng Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	228.484.500	APBD
7	Perbaikan Barang Milik Daerah Pemasng Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	266.942.900	APBD
JUMLAH		Rp.	12.183.845.456	

BUPATI BELITUNG

SAHANT SALEH, S.Sos

Tanjungpinang, 23 Desember 2022

KAMMIN, S.JP, MAB
 c/ Jembina Tk. I
 NIP. 196908241990031004

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN BELITUNG**

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Kepmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)						
URUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8,202,305,873				8,152,604,693	8,152,604,693							
1	01	2	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1	01	2	01	Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1	01	2	01	11	Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan anggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	5,463,486,988		1. Persentase dokumen perencanaan anggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	5,526,877,938	5,442,146,988			
1	01	2	01	1.	Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan anggaran dan evaluasi perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	7 100 %	6,000,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan anggaran dan evaluasi perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	6 100 %	6,000,000	6,000,000			
1	01	2	01	01	Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	3	Dokumen	3,000,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	3,000,000	3,000,000
1	01	2	01	07	Sub Kegiatan	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanjungpandan	3	Dokumen	3,000,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3,000,000	3,000,000
							Promosi pembangunan daerah		1	Kali							
1	01	2	02	2.	Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	3 100 %	4,578,065,888	APBD Kabupaten	Keluaran : Dokumen Keuangan perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	3 100 %	4,594,184,888	4,594,184,888			
1	01	2	02	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Gaji dan tunjangan ASN	Tanjungpandan	14	Bulan	4,575,065,888	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	4,591,184,888	4,591,184,888
1	01	2	02	08	Sub Kegiatan	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tanjungpandan	2	Dokumen	3,000,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	Dokumen	3,000,000	3,000,000
							2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		75	%			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	%		
1	01	2	05	3.	Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	57 75 %	23,500,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	42 75 %	18,150,000	18,150,000			
1	01	2	05	02	Sub Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Harian (Hitam Putih)	Tanjungpandan	47	Stel	23,500,000		Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	18,150,000	18,150,000
							3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100	%			3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100	%		
1	01	2	06	4.	Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 100 %	316,185,800	APBD Kabupaten	Keluaran : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 100 %	331,641,200	316,185,800			
1	01	2	06	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tanjungpandan	100	%	7,000,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7,000,000	7,000,000
1	01	2	06	02	Sub Kegiatan	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjungpandan	100	%	56,434,800	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	56,434,800	56,434,800
1	01	2	06	03	Sub Kegiatan	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Peralatan rumah tangga	Tanjungpandan	100	%	14,000,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	14,000,000	14,000,000
1	01	2	06	04	Sub Kegiatan	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : bahan logistik kantor	Tanjungpandan	100	%	101,304,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	101,304,000	101,304,000
1	01	2	06	05	Sub Kegiatan	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : barang cetak dan penggandaan	Tanjungpandan	100	%	43,700,000	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	43,700,000	43,700,000

Bertambah/
Berkurang

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Keppmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1.01.2.06.06	Sub Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjungpandan	100 %	4,500,000	APBD Kabupaten	nambah Rp1.140.000 utk berlangganan kompas (nambah 3 bulan sebelumnya dianggarkan 9 bulan)	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,640,000	4,500,000	1,140,000
1.01.2.06.07	Sub Kegiatan 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tanjungpandan	100 %	89,247,000	APBD Kabupaten	nambah Rp. 14.315.400,- karena sisa sampai dengan bulan Mei Rp2jt	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103,562,400	89,247,000	14,315,400
		4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %				4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %			
1.01.2.07	5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : - Hasil : -		- -	0	APBD Kabupaten		Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 % 100 %	61,475,550	0	61,475,550
1.01.2.07.11	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : -		-	0	APBD Kabupaten	nambah Rp 61.475.550 untuk penambahan sarana rumah singgah (LK3), rencana dialihkan ke sekretariat	Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	61,475,550	0	61,475,550
1.01.2.08	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100 % 100 %	219,793,300	APBD Kabupaten		Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 % 100 %	228,484,300	220,684,300	7,800,000
1.01.2.08.01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah materi Jumlah barang yang dikirim	Tanjungpandan	500 Lembar 10 kali	3,000,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	
1.01.2.08.02	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Tanjungpandan	12 Bulan	51,600,000	APBD Kabupaten	nambah Rp7.800.000 untuk pembiayaan telpon/ Internet	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59,400,000	51,600,000	7,800,000
1.01.2.08.04	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tenaga Non PNS Sopir Tenaga Non PNS Penjaga Malam Tenaga Non PNS Petugas Kebersihan	Tanjungpandan	1 Orang 1 Orang 3 Orang	165,193,300	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166,084,300	166,084,300	
1.01.2.09	7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang milik daerah dalam kondisi baik Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		6 Jenis 100 %	319,942,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Barang milik daerah dalam kondisi baik Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	4 Jenis 100 %	286,942,000	286,942,000	
1.01.2.09.02	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 4/lebih yang dipelihara Kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 2/3 yang dipelihara	Tanjungpandan	9 Unit 26 Unit	195,750,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	208,750,000	208,750,000	
1.01.2.09.05	Sub Kegiatan 3. Pemeliharaan Mebel	Keluaran : Mebel yang dipelihara	Tanjungpandan	10 Unit	3,000,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	3,000,000	3,000,000	

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Keppmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1 01 2 09 06	Sub Kegiatan 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Tanjungpandan	56 Unit	21,640,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	21,640,000	21,640,000	
1 01 2 09 09	Sub Kegiatan 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Tanjungpandan	2 Unit	99,552,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	53,552,000	53,552,000	
1 01	Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1 01 02	1. Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Outcome : Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial		100 %	490,077,975			Outcome : Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100 %	498,978,335	471,978,335	
1 01 02 2.01	1. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PSKS) Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah PSKS yang aktif Hasil : Kearukatan Data (capaian 2020 = 70%)		165 PSKS 100 %	490,077,975	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah PSKS yang aktif Hasil : Kearukatan Data (capaian 2020 = 70%)	165 PSKS 100 %	498,978,335	471,978,335	
1 01 02 2.01 01	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : jumlah pendamping BPNT terfasilitasi jumlah pendamping PKH terfasilitasi jumlah tenaga kesejahteraan sosial	Kabupaten Belitung	6 orang 22 orang 54 orang	158,926,825	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	82 orang	159,905,985	159,905,985	
1 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah penerima penghargaan kepada veteran / pejuang	Kabupaten Belitung	23 orang	79,356,500	APBD Kabupaten	Belum masuk Total Penambahan 130.000.000 >>rencana penambahan DED monumen HAS Hananjoedin di Jawa Timur (100jt DED Monumen Pahlawan dan 30jt Perjalanan Dinas)	Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Keluarga	106,356,500	79,356,500	27,000,000
1 01 02 2.02 03	Sub Kegiatan 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah karang taruna yang dibina	Kabupaten Belitung	6 Lembaga	163,326,300	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	144,069,300	144,069,300	
1 01 02 2.02 04	Sub Kegiatan 4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran : Laporan LK3	Kabupaten Belitung	1 Dokumen	88,468,350	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	88,646,550	88,646,550	
1 01 03	2. Program : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng diluar panti yang mendapat layanan rehabilitasi sosial		100 %	641,561,990			Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100 %	564,495,790	625,971,340	
1 01 03 3.01	1. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Keluaran : Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial Hasil : Terpenuhnya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti		105 orang 100 %	540,223,550	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial Hasil : Terpenuhnya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	105 Orang 100 %	489,977,350	536,520,400	
1 01 03 3.01 01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Permakanan	Keluaran : Jumlah anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah disabilitas terlantar yang menerima rehabilitasi sosial diluar panti	Kabupaten Belitung	15 orang 30 orang	217,349,200	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 orang	219,114,200	217,349,200	1,765,000

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Keppmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Jumlah lansia terlantar yang menerima rehabilitasi sosial diluar panti		60 orang								
1	01 03 3.01 01	Sub Kegiatan 2 Penyediaan Alat Bantu	Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas yang menerima alat bantu Kabupaten Belitung	27 orang	69,722,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	40,572,000	69,722,000	-29,150,000
1	01 03 3.01 01	Sub Kegiatan 3 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran : Lansia yang menerima layanan reunifikasi keluarga Kabupaten Belitung Disabilitas yang menerima layanan reunifikasi keluarga Anak yang menerima layanan reunifikasi keluarga	60 orang 30 orang 15 Orang	146,035,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	143,860,300	146,747,800	-2,887,500
1	01 03 3.01 01	Sub Kegiatan 4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran : peserta sosialisasi " adopsi anak"	30 orang	107,117,350	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	86,430,850	102,701,400	-16,270,550
1	01 03 3.01	2. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Keluaran : Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Belitung Hasil : Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	100 % 100 %	101,338,440	APBD Kabupaten		Keluaran : Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial Hasil : Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	100 % 100 %	74,518,440	89,450,940	
1	01 03 3.01 01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Permakanan	Keluaran : Jumlah Permakanan bagi PMKS lainnya Kabupaten Belitung	18 orang	11,550,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	6,930,000	8,662,500	-1,732,500
		2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran : Terlayannya kebutuhan kesehatan PMKS lainnya di luar panti Tanjungpandan	100 %	20,605,000	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	20,605,000	20,605,000	
		3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran : Terlaksananya Penelusuran Keluarga PMKS Lainnya di luar panti Tanjungpandan	100 %	69,183,440	APBD Kabupaten	nambah Rp 61.475.550 untuk penambahan sapsas rumah singgah (LK3), rencana dialihkan ke sekretariat	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	46,983,440	60,183,440	-13,200,000
1	01 03	3 Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial Kabupaten Belitung	100 %	341,383,450			Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	341,561,650	341,561,650	
1	01 03 3.01	1. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi Hasil : Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	100 % 100 %	341,383,450	APBD Kabupaten		Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi Hasil : Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	100 %	341,561,650	341,561,650	

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Keppmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1.01.03.01.01	Sub Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	Kabupaten Belitung	100 %	341,383,450	APBD Kabupaten	Honor PSM/TKSK baru dianggarkan 9 bulan, Belum masuk Rp. 84.750.000,- >>rencana menambah honor PSM (49 org @500.000 x 3= Rp73.500.000) dan TKSK (5 org @750.000 x 3 = 11.250.000) untuk 3 bulan total 84.750.000	Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8682 Keluarga	341,561,650	341,561,650	
1.01.03	4 Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100 %	481,946,100			Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	445,395,900	445,395,900	
1.01.03.01.01	1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan sosial Hasil : Terlayannya korban bencana	Kabupaten Belitung	100 %	481,946,100	APBD Kabupaten		Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan sosial Hasil : Terlayannya korban bencana	100 %	445,395,900	445,395,900	
1.01.03.01.01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran : Laporan Pembinaan TAGANA dan Relawan KSB (Kampung Siaga Bencana)	Tanjungpandan	1 Dok	481,946,100	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	445,395,900	445,395,900	
1.01.03	5 Program : PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang tertata		100 %	6,721,660			Taman Makam Pahlawan yang tertata	100 %	6,721,660	6,721,660	
1.01.03.01.01	1. Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan Hasil : Terpeliharanya taman makam pahlawan		100 %	6,721,660	APBD Kabupaten		Keluaran : Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan Hasil : Terpeliharanya taman makam pahlawan	100 %	6,721,660	6,721,660	
	Sub Kegiatan : 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran : Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	6,721,660			Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	54 Makam	6,721,660	6,721,660	
1	Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.02	Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.02.16	6 Program : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		0.50 %	276,124,990			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.50 %	260,255,075	260,255,075	
	1 Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG Hasil : Terlaksananya Kebijakan PUG	Kabupaten Belitung	10 SKPD	34,604,850			Keluaran : Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG Hasil : Terlaksananya Kebijakan PUG	10 Perangkat Daerah	34,604,850	34,604,850	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran : Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Belitung	1 Dok	18,800,050			Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	18,800,050	18,800,050	

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Keppmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Pelaksanaan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran : Peserta pelatihan	Kabupaten Belitung	35 Orang	15,804,800			Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	15,804,800	15,804,800	
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Organisasi perempuan Hasil : Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		21 Organisasi 100 %	227,191,490			Keluaran : Terfasilitasinya Organisasi perempuan Hasil : Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Organisasi Perempuan 100 %	211,321,575	211,321,575	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Keluaran : Peserta Sosialisasi Industri Rumah Tangga Perempuan	Kabupaten Belitung	250 Orang	17,721,500			Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	17,721,500	17,721,500	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran : Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kelembagaan Perempuan	Kabupaten Belitung	1 Dok	209,469,990			Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Organisasi	193,600,075	193,600,075	
1 02 16 16.01 3	1. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya layanan Pemberdayaan Perempuan dan anak	Kabupaten Belitung	1 Lembaga 100 %	14,328,650	APBD Kabupaten		Keluaran : Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya layanan Pemberdayaan Perempuan dan anak	1 Lembaga 100 %	14,328,650	14,328,650	
1 02 16 16.01 01	Sub Kegiatan 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan Fasilitasi dan koordinasi Forum Puspa (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)	Kabupaten Belitung	1 Dok	14,328,650	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	14,328,650	14,328,650	
1 02 16	7 Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan		100 %	126,410,700			Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	222,633,055	222,633,055	
1 02 16 16.01 1	1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Hasil :	-	- - - -	0	DAK Non Fisik		Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	1 Dok 100 %	28,875,288	28,875,288	
1 02 16 16.01 01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Hasil :	-	- - - -	0	DAK Non Fisik		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	28,875,288	28,875,288	
1 02 16 16.01 2	1. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah lembaga yang terfasilitasi Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Kabupaten Belitung	3 Lembaga 100 %	126,410,700			Keluaran : Jumlah lembaga yang terfasilitasi Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	3 Lembaga 100 %	193,757,767	193,757,767	
1 02 16 16.01 01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan operasional lembaga perlindungan perempuan Operasional pelayanan KTPA/TPPO	Kabupaten Belitung	1 Dok 100 %	126,410,700	APBD Kabupaten		Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	37 Orang	126,767,100	126,767,100	
1 02 16 16.01 02	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : -	Kabupaten Belitung	- -	0	DAK Non Fisik		Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Layanan	66,990,667	66,990,667	

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Keppmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
2	08 04												
2	08 04	2.02	1	Program : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani		100 %	27,260,825		Persentase keluarga yang terlayani	100 %	27,260,825	27,260,825
2	08 04	2.02	1	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Lembaga Keluarga yang dibina Hasil : Meningkatnya layanan keluarga	Kabupaten Belitung	1 Lembaga 100 %	27,260,825	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat penguatan dan pengembangan Hasil : Meningkatnya ketahanan keluarga	1 Lembaga 100 %	27,260,825	27,260,825
2	08 04	2.02	01	Sub Kegiatan 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan Operasional PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Kabupaten Belitung	1 Dokumen	27,260,825	APBD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	27,260,825	27,260,825
1	02 16			8 Program : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)		25 %	42,727,420		Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	25 %	42,727,420	42,727,420
1	02 16	16.01		1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Tersedianya data gender dan anak Hasil : Data terpilah gender dan anak yang akurat	Kabupaten Belitung	1 Dok 80 %	42,727,420		Keluaran : Tersedianya data gender dan anak Hasil : Data terpilah gender dan anak yang akurat	1 Dok 80 %	42,727,420	42,727,420
1	02 16	16.01	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Data terpilah dan informasi gender dan anak	Kabupaten Belitung	1 Dokumen	42,727,420		Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	42,727,420	42,727,420
1	02 16			9 Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)		Pratama	239,615,450		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	189,360,050	239,615,450
1	02 16	16.01		1. Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Tercapainya peningkatan status KLA Hasil : Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Kabupaten Belitung	750 Point 100 %	30,803,000		Keluaran : Tercapainya peningkatan status KLA Hasil : Meningkatnya perlindungan terhadap anak	750 Point 100 %	11,810,325	30,803,000
1	02 16	16.01	01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Gugus Tugas KLA	Kabupaten Belitung	1 Dok	30,803,000		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	30,803,000	30,803,000
1	02 16	16.01		2. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya layanan terhadap anak	Kabupaten Belitung	1 Dok 100 %	208,812,450		Keluaran : Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya layanan terhadap anak	1 Dok 100 %	177,549,725	208,812,450
	02 16	16.01		Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Keluaran : Terpilihnya Duta Anak Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan kegiatan hari anak Laporan fasilitasi Forum Anak Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	10 Orang 1 Dok 1 Dok	208,812,450		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	208,812,450	208,812,450
1	02 16			10 Program : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100 %	64,988,325		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %	26,336,995	26,336,995
1	02 16	16.01		1. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	Kabupaten Belitung	100 % 100 %	64,988,325		Keluaran : Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	100 % 100 %	26,336,995	26,336,995

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan (Kepmendagri 050-5889 Th.2021)			DPA INDUK / Pergeseran 2022	Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1.02.16.01.01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/Kota	Keluaran : Peserta Bintek PATBM	Kabupaten Belitung	50 Orang	58,286,525	DAK Non Fisik		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	19,635,195	19,635,195	
1.02.16.01.01	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan pembinaan dan evaluasi PATBM	Kabupaten Belitung	1 Dok	6,701,800			Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	6,701,800	6,701,800	
Jumlah						8,202,305,873				8,152,604,693	8,152,604,693	0

Tanjungpandan, 14 Juli 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

Indikator Program semula :

5,465,402,388

7 Dokumen Kegiatan : Renstra,
Renja, Renja P, RKA, RKA P, DPA,
DPA P

**7. Persentase sarana dan prasarana yang
terpelihara**

3 Dok : Renstra, Renja, Renja P

3 Dok : Dalev, LKPI dan LAKJIP

3 Dok : Laporan keuangan akhir tahun, LRA, Prognosis

57 Orang Jumlah pegawai perangkat daerah

realisasi fisik : persentase barang yang dibelanjakan terhadap total barang yang direncanakan

Termasuk ATK, kertas, Spanduk, umbul2, Bendera

Termasuk alat kebersihan, bahan pembersih, peralatan dapur, peralatan tukang, peralatan cuci tangan, peralatan P3K, masker dll.

Termasuk makan minum pegawai, BBM, cinderamata, plakat, karangan bunga

fotocopy, cetak, jilid, cover

43000000



195,750,000

157,000,000

-50,255,400

(Bertambah)

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1																				
1	06																			
1	06	01																		
1	06	01	2.0																	
1	06	01	2.0	01																
1	06	01	2.0	07																
1	06	01	2.0	02																
1	06	01	2.0	08																
1	06	01	2.0	05																

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	33 Stel	1 Paket	75 %	75 %	18,150,000	18,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	31,020,000			
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											316,185,800	342,836,050				349,523,020			
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1 Paket	100 %	100 %	7,000,000	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	7,700,000			
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2 Paket	100 %	100 %	56,434,800	56,434,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	62,146,920			
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1 Paket	100 %	100 %	14,000,000	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	15,400,000			
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2 Paket	100 %	100 %	101,304,000	103,061,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	113,084,400			
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1 Paket	100 %	100 %	43,700,000	43,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	48,070,000			
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	4,500,000	5,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	4,950,000			
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Pelayanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Persentase Pelayanan	Kab. Belitung,	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	100 %	100 %	89,247,000	113,000,000	Dana Transfer	Persentase Pelayanan	100 %	98,171,700			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	SKPD	Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Tanjung Pandan, Semua Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah			
1 06 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	42,385,100			46,623,610			
1 06 01 2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah			100 %		1 Unit		100 %		0	42,385,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	46,623,610
1 06 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											220,684,300	228,484,300			276,980,000			
1 06 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 Lembar	12 Laporan	100 %	100 %		3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	2,200,000
1 06 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Laporan	100 %	100 %		51,600,000	59,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	56,760,000
1 06 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Orang	12 Laporan	100 %	100 %		166,084,300	166,084,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	218,020,000
1 06 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											286,942,000	286,942,000			327,184,000			
1 06 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Unit	14 Unit	100 %	100 %		208,750,000	208,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	300,080,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	3,300,000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Unit	25 Unit	100 %	100 %	21,640,000	21,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	23,804,000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	53,552,000	53,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											471,978,335	449,351,380				539,085,765	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											471,978,335	449,351,380				539,085,765	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keakuratan Data	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 orang	82 Orang	100 %	100 %	159,905,985	151,205,985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 %	174,819,500	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keakuratan Data	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 orang	18 Keluarga	100 %	100 %	79,356,500	75,756,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 %	87,292,150	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Persentase PMKS yang Menerima Program	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang	Keakuratan Data	Kab. Belitung, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	6 lembaga	6 lembaga	100 %	100 %	144,069,300	144,069,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase PMKS yang Menerima Program	100 %	179,658,930	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
	Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sosial	Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kelurahan									Umum		Pemberdayaan Sosial		
1 06 02 2.0 3 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Keakuratan Data	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 Sertifikat	100 %	100 %	88,646,550	78,319,595	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 %	97,315,185
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												625,971,340	559,157,040		585,464,309		
1 06 04 2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												536,520,400	490,180,600		473,992,025		
1 06 04 2.0 1 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Orang	105 Orang	100 %	100 %	217,349,200	219,138,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %	129,541,500

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.06.04.2.0.03.1	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	27 Orang	21 Orang	100 %	100 %	69,722,000	40,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100 % 100 %	76,693,925	
1.06.04.2.0.04.1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	60 Orang	105 Orang	100 %	100 %	146,747,800	143,939,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar,	100 % 100 %	160,639,160	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
		mendapat layanan rehabilitasi sosial													anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial			
1 06 04 2.0 1 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	102,701,400	86,530,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100 % 100 %	107,117,440	
1 06 04 2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											89,450,940	68,976,440			111,472,284		
1 06 04 2.0 2 03	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gepeng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Orang	12 Orang	100 %	100 %	8,662,500	6,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia	100 %	12,705,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota													Terlantar serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial				
1 06 04 2 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	12 Orang	100 %	100 %	20,605,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %	22,665,500			
1 06 04 2 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya di Luar Panti	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	12 Orang	100 %	100 %	60,183,440	46,983,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gepeng diluar Panti yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %	76,101,784			
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											341,561,650	426,311,650			375,521,795				
1 06 05 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											341,561,650	426,311,650			375,521,795				
1 06 05 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Orang Tidak Mampu dan PMKS yang Akurat	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	8682 Keluarga	100 %	100 %	341,561,650	426,311,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	375,521,795			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
														Alokasi Umum						
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											445,395,900	445,395,900					530,140,710		
1 06 06 2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											445,395,900	445,395,900					530,140,710		
1 06 06 2.0 2 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Dasarnya pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Korban Bencana	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dok	45 Orang	100 %	100 %	445,395,900	445,395,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	100 %	530,140,710		
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											6,721,660	6,721,660					7,393,826		
1 06 07 2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											6,721,660	6,721,660					7,393,826		
1 06 07 2.0 1 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang Tertata	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	54 Makam	100 %	100 %	6,721,660	6,721,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Taman Makam Pahlawan yang Tertata	100 %	7,393,826		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											703,327,670	846,629,871					1,067,825,227		
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											260,255,075	338,170,405					466,073,575		
2 08 02 2.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											34,604,850	21,434,480					41,123,335		
2 08 02 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan PUG	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,50 %	0,50 %	1 Dok	1 Dok	10 SKPD	10 PD	18,800,050	5,929,680	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,50 %	22,638,055		
2 08 02 2.0 1 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Persentase ARG pada Belanja	Jumlah Perangkat	Terlaksananya Kebijakan PUG	Kab. Belitung,	0,50 %	0,50 %	35 Orang	35 Perangkat Daerah	10 SKPD	10 PD	15,804,800	15,504,800	Dana Transfer		Persentase ARG pada	0,50 %	18,485,280		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Langsung APBD	Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum		Belanja Langsung APBD				
2 08 02 2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											211,321,575	302,407,275				409,188,725			
2 08 02 2.0 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,50 %	0,50 %	250 Orang	1 Dok	100 %	100 %	17,721,500	17,721,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,50 %	20,538,650		
2 08 02 2.0 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,50 %	0,50 %	1 Dokumen	19 Organisasi	100 %	100 %	193,600,075	284,685,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,50 %	388,650,075		
2 08 02 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											14,328,650	14,328,650				15,761,515			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Laporan Fasilitasi dan koordinasi Forum Puspa (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)	Meningkatnya Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,50 %	0,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	14,328,650	14,328,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,50 %	15,761,515
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											126,767,100	222,633,055					234,917,725
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											0	28,875,288					28,875,288
2.08.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Dok		100 %	0	28,875,288	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	28,875,288
2.08.03.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											126,767,100	193,757,767					206,042,437
2.08.03.2.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dok	37 Orang	100 %	100 %	126,767,100	126,767,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Perlindungan Perempuan	100 %	139,051,770
2.08.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		11 Layanan	100 %	100 %	0	66,990,667	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Layanan Perlindungan Perempuan	100 %	66,990,667

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											27,260,825	27,260,825					38,258,908		
2 08 04 2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											27,260,825	27,260,825					38,258,908		
2 08 04 2.0 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Terlayani	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Meningkatnya ketahanan keluarga	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Lembaga	100 %	100 %	27,260,825	27,260,825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keluarga yang Terlayani	100 %	38,258,908		
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											42,727,420	41,827,420					48,409,504		
2 08 05 2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											42,727,420	41,827,420					48,409,504		
2 08 05 2.0 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Data Terpilah Gender dan Anak yang Akurat	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	42,727,420	41,827,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Data Sistem Informasi Gender dan Anak	25 %	48,409,504		
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											239,615,450	190,401,171					253,158,340		
2 08 06 2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											30,803,000	11,828,383					33,833,300		
2 08 06 2.0 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pratama	Pratama	Pratama	1 Dok	100 %	100 %	30,803,000	11,828,383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	33,833,300		
2 08 06 2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											208,812,450	178,572,788					219,325,040		
2 08 06 2.0 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Meningkatnya Layanan Terhadap Anak	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pratama	Pratama	Pratama	1 Dok	100 %	100 %	208,812,450	178,572,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	219,325,040		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Kabupaten/Kota		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											6,701,800	26,336,995				27,007,175			
2 08 07 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											6,701,800	26,336,995				27,007,175			
2 08 07 2.0 3 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Perlindungan Anak di Tingkat Desa/ Kelurahan	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	1 Dok	100 %	100 %	0	19,635,195	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100 %	19,635,195		
2 08 07 2.0 3 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Perlindungan Anak di Tingkat Desa/ Kelurahan		100 %	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	6,701,800	6,701,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100 %	7,371,980		
TOTAL												8,037,103,543	8,233,758,564				9,179,234,739			

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
PERIODE BULAN DESEMBER 2022

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	FLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA, NOMOR, TGL)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA, NOMOR, TGL)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANDEMEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			5,442,146,988	5,500,191,063	-	-	-	5,500,191,063	-	5,150,803,728	93.65	100.00	344,127,235	9.31		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6,000,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	100.00	100.00	-	0.00		
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	0.00		
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	100.00	-	0.00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,594,184,888	4,575,393,613				4,575,393,613	-	4,313,635,384	94.28	100.00	261,758,229	2.87		
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,591,184,888	4,572,393,613	Swakelola	-	-	4,572,393,613	-	4,310,635,584	94.28	100.00	261,758,029	5.72		
4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,000,000	3,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3,000,000	-	2,999,800	99.99	100.00	200	0.01		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18,150,000	18,150,000				18,150,000	-	18,131,850	99.90	100.00	18,150	0.10		
5		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18,150,000	18,150,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	18,150,000	-	18,131,850	99.90	100.00	18,150	0.10		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		316,185,800	342,836,050				342,836,050	-	341,976,400	99.75	100.00	859,650	0.88		
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	7,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	7,000,000	-	6,999,500	99.99	100.00	500	0.01		
7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,434,800	56,434,800	Swakelola (Penyedia)	-	-	56,434,800	-	56,049,600	99.32	100.00	385,200	0.68		
8		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,000,000	14,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	14,000,000	-	13,997,800	99.98	100.00	2,200	0.02		
9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101,304,000	103,061,250	Swakelola (Penyedia)	-	-	103,061,250	-	102,890,000	99.83	100.00	171,250	0.17		
10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,700,000	43,700,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	43,700,000	-	43,699,500	100.00	100.00	500	0.00		
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000	5,640,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	5,640,000	-	5,340,000	94.68	100.00	300,000	5.32		
12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,247,000	113,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	113,000,000	-	113,000,000	100.00	100.00	-	0.00		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42,385,100				42,385,100	-	37,125,000	87.59	100.00	5,260,100	12.41		
13		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		42,385,100	Swakelola (Penyedia)	-	-	42,385,100	-	37,125,000	87.59	100.00				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		220,684,300	228,484,300				228,484,300	-	220,529,716	96.52	100.00	7,954,584	18.28		
14		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3,000,000	-	1,683,400	56.11	100.00	1,316,600	43.89		

15		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,600,000	59,400,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	59,400,000	-	52,955,316	89.15	100.00	6,444,684	10.85		
16		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,084,300	166,084,300	Swakelola (Penyedia)	-	-	166,084,300	-	165,891,000	99.88	100.00	193,300	0.12		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		286,942,000	286,942,000				286,942,000	-	213,405,378	74.37	100.00	73,536,622	24.51		
17		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208,750,000	208,750,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	208,750,000	-	139,323,778	66.74	100.00	69,426,222	33.26		
18		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	3,000,000	3,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3,000,000	-	2,240,000	74.67	100.00	760,000	25.33		
19		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,640,000	21,640,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	21,640,000	-	18,486,600	85.43	100.00	3,153,400	14.57		
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53,552,000	53,552,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	53,552,000	-	53,355,000	99.63	100.00	197,000	0.37		
2.	Program Pemberdayaan Sosial			471,978,335	3,887,579,047				3,887,579,047	-	2,273,292,575	58.48	100.00	1,614,286,472	19.54		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		471,978,335	3,887,579,047				3,887,579,047	-	2,273,292,575	58.48	100.00	1,614,286,472	19.54		
21		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	159,905,985	151,205,985	Swakelola (Penyedia)	-	-	151,205,985	-	129,669,465	85.76	100.00	21,536,520	14.24		
22		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	79,356,500	3,536,713,017	Swakelola (Penyedia)	-	-	3,536,713,017	-	1,962,453,360	55.49	100.00	1,574,259,657	44.51		
23		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	144,069,300	121,340,450	Swakelola (Penyedia)	-	-	121,340,450	-	112,043,250	92.34	100.00	9,297,200	7.66		
24		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88,646,550	78,319,595	Swakelola (Penyedia)	-	-	78,319,595	-	69,126,500	88.26	100.00	9,193,095	11.74		
3.	Program Rehabilitasi Sosial			625,971,340	559,157,040				559,157,040	-	473,578,624	84.70	100.00	85,578,416	65.82		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial		536,520,400	490,180,600				490,180,600	-	462,154,917	94.28	100.00	28,025,683	8.68		
25		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	217,349,200	219,138,700	Swakelola (Penyedia)	-	-	219,138,700	-	216,277,703	98.69	100.00	2,860,997	1.31		
26		Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	69,722,000	40,572,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	40,572,000	-	36,049,600	88.85	100.00	4,522,400	11.15		
27		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	146,747,800	143,939,050	Swakelola (Penyedia)	-	-	143,939,050	-	140,531,750	97.63	100.00	3,407,300	2.37		
28		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	102,701,400	86,530,850	Swakelola (Penyedia)	-	-	86,530,850	-	69,295,864	80.08	100.00	17,234,986	19.92		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial		89,450,940	68,976,440				68,976,440	-	11,423,707	16.56	100.00	57,552,733	122.95		

29		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	8,662,500	6,993,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	6,993,000	-	2,447,500	35.00	100.00	4,545,500	65.00		
30		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	20,605,000	15,000,000	Swakelola (Penyedia)	-	-	15,000,000	-	-	0.00	100.00	15,000,000	100.00		
31		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60,183,440	46,983,440	Swakelola (Penyedia)	-	-	46,983,440	-	8,976,207	19.11	100.00	38,007,233	80.89		
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			341,561,650	426,311,650				426,311,650	-	420,185,855	98.56	100.00	6,125,795	1.44		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		341,561,650	426,311,650				426,311,650	-	420,185,855	98.56	100.00	6,125,795	1.44		
32		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	341,561,650	426,311,650	Swakelola (Penyedia)	-	-	426,311,650	-	420,185,855	98.56	100.00	6,125,795	1.44		
5.	Program Penanganan Bencana			445,395,900	445,395,900				445,395,900	-	402,359,450	90.34	100.00	43,036,450	9.66		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		445,395,900	445,395,900				445,395,900	-	402,359,450	90.34	100.00	43,036,450	9.66		
33		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	445,395,900	445,395,900	Swakelola (Penyedia)	-	-	445,395,900	-	402,359,450	90.34	100.00	43,036,450	9.66		
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			6,721,660	6,721,660				6,721,660	-	3,584,560	100.00	100.00	3,137,100	46.67		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		6,721,660	6,721,660				6,721,660	-	3,584,560	100.00	100.00	3,137,100	46.67		
34		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6,721,660	6,721,660	Swakelola (Penyedia)	-	-	6,721,660	-	3,584,560	53.33	100.00	3,137,100	46.67		
7.	Program Pnegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan			260,255,075	850,033,630				850,033,630	-	324,257,269	35.44	100.00	525,776,361	4.86		
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		34,604,850	21,434,480				21,434,480	-	21,384,012	99.76	100.00	50,468	0.14		
45		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	18,800,050	5,929,680	Swakelola (Penyedia)	-	-	5,929,680	-	5,901,050	99.52	100.00	28,630	0.48		
36		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15,804,800	15,504,800	Swakelola (Penyedia)	-	-	15,504,800	-	15,482,962	99.86	100.00	21,838	0.14		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		211,321,575	814,270,500				814,270,500	-	288,553,107	35.44	100.00	525,717,393	4.86		
37		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17,721,500	529,584,725	Swakelola (Penyedia)	-	-	529,584,725	-	17,709,300	3.34	100.00	511,875,425	96.66		
38		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	193,600,075	284,685,775	Swakelola (Penyedia)	-	-	284,685,775	-	270,843,807	95.14	100.00	13,841,968	4.86		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		14,328,650	14,328,650				14,328,650	-	14,320,150	99.94	100.00	8,500	0.06		
39		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	14,328,650	14,328,650	Swakelola (Penyedia)	-	-	14,328,650	-	14,320,150	99.94	100.00	8,500	0.06		

8.	Program Perlindungan Perempuan			126,767,100	222,633,055				222,633,055	-	191,942,025	84.84	100.00	9,783,275	7.72		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	28,875,288				28,875,288	-	27,558,200	95.44	100.00	1,317,088	4.56		
40		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	-	28,875,288	Swakelola (Penyedia)	-	-	28,875,288	-	27,558,200	95.44	100.00	1,317,088	4.56		
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		126,767,100	193,757,767				193,757,767	-	164,383,825	84.84	100.00	9,783,275	7.72		
41		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	126,767,100	126,767,100	Swakelola (Penyedia)	-	-	126,767,100	-	116,983,825	92.28	100.00	9,783,275	7.72		
42		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	66,990,667	Swakelola (Penyedia)	-	-	66,990,667	-	47,400,000	70.76	100.00	19,590,667	29.24		
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			27,260,825	27,260,825				27,260,825	-	23,228,225	0.00	100.00	4,032,600	14.79		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		27,260,825	27,260,825				27,260,825	-	23,228,225	0.00	100.00	4,032,600	14.79		
43		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/ Kota.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/ Kota.	27,260,825	27,260,825	Swakelola (Penyedia)	-	-	27,260,825	-	23,228,225	85.21	100.00	4,032,600	14.79		
10.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			42,727,420	41,827,420				41,827,420	-	37,225,856	0.00	100.00	4,601,564	11.00		
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		42,727,420	41,827,420				41,827,420	-	37,225,856	0.00	100.00	4,601,564	11.00		
44		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	42,727,420	41,827,420	Swakelola (Penyedia)	-	-	41,827,420	-	37,225,856	89.00	100.00	4,601,564	11.00		
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			239,615,450	190,401,171				190,401,171	-	184,599,426	188.29	100.00	5,801,745	4.97		
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		30,803,000	11,828,383				11,828,383	-	10,757,151	90.94	100.00	1,071,232	9.06		
45		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30,803,000	11,828,383	Swakelola (Penyedia)	-	-	11,828,383	-	10,757,151	90.94	100.00	1,071,232	9.06		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		208,812,450	178,572,788				178,572,788	-	173,842,275	97.35	100.00	4,730,513	0.88		
46		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	208,812,450	178,572,788	Swakelola (Penyedia)	-	-	178,572,788	-	173,842,275	97.35	100.00	4,730,513	2.65		

12.	Program Perlindungan Khusus Anak			6,701,800	26,336,995				26,336,995	-	25,068,675	97.33	100.00	524,370	100.00		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6,701,800	26,336,995				26,336,995	-	25,068,675	97.33	100.00	524,370	100.00		
47		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	19,635,195	Swakelola (Penyedia)		-	19,635,195	-	19,110,825	97.33	100.00	524,370	2.67		
48		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	6,701,800	6,701,800	Swakelola (Penyedia)		-	6,701,800	-	5,957,850	88.90	100.00	743,950	11.10		
TOTAL				8,037,103,543	12,183,849,456				12,183,849,456	-	9,510,126,268	78.06	100.00	2,673,723,188	21.94		

TANJUNGPANDAN, 9 DESEMBER 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

FORM 2 : PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

1. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan 1. "Meningkatnya Kesejahteraan PMKS" ; Sasaran Strategis Ke 1. "Meningkatnya penanganan PMKS"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Persentase penurunan PMKS per tahun	Kualitatif	0.5	(Jumlah PMKS Tahun n-1 - Jumlah PMKS Tahun n) / Jumlah PMKS Tahun n-1 x 100%	Tabel Jenis PMKS tahun 2021 dan 2022	$= (14.829 - 14.686) / 14.829 \times 100\% = 143/14.829 \times 100\% = 0,96$	0.96	192.00	Eselon II (Indikator IKU)
2	Persentase PMKS yang tertangani	Kuantitatif	80%	= Jumlah PMKS yang diberikan bantuan/ Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Tabel Jenis PMKS yang menerima bantuan dan yang seharusnya menerima bantuan sd. Triwulan IV Tahun 2022	$= 14.509 / 14.686 \times 100\% = 98,79\%$	98.79	123.49	Eselon II (Indikator IKU)
1	Persentase Penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti/jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti)x100%	Data kinerja dari bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (Data SPM triwulan IV 2022)	$= (86+1154+30) / 1270 * 100 = 100\%$	100%	100.00	Eselon III (Indikator Program)
1.1	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Kuantitatif	105 orang	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan Gelandangan yang mendapatkan Rehabilitas sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 orang	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	105 Orang	Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai standar gizi minimal	Data Kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 Orang	100.00	

	2	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ kota	Kuantitatif	21 orang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	21 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	3	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Kuantitatif	105 orang	Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 orang	100.00	
	4	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/ Kota	Kuantitatif	30 orang	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	30 orang	100.00	
1.2.		Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Kuantitatif	100%	Jumlah PMKS lainnya yang menerima layanan dibagi jumlah PMKS lainnya (pemerlu pelayanan) dikali 100%	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	13/13 x 100% = 100%	100%	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	12 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	13 orang	108.33	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	12 orang	Jumlah PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan kesehatan di luar panti	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	13 orang	108.33	
	3	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	12 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	13 orang	108.33	

2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penerima program pemberdayaan sosial _ KK/ Jumlah Penduduk Miskin_ KK) x 100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	=8740/ 20742 x 100% = 42,14%	42,14	42,14	Eselon III (Indikator Program)
2.1	Jumlah PSKS yang aktif	Kuantitatif	165 PSKS	Jumlah PSKS aktif di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	165 PSKS	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kualitatif	82 orang	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial, pendamping BPNT, dan pendamping PKH terfasilitasi	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	82 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	18 Keluarga	Jumlah penerima penghargaan kepada veteran / pejuang	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	18 Keluarga	100.00	
3	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	6 Lembaga	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (Karang Taruna) yang dibina	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	6 Lembaga	100.00	
4	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	1 Sertifikat	Jumlah sertifikat SDM/ Lembaga LK3	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	1 Sertifikat	100.00	

3	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial (PBI) / Jumlah Jiwa dalam DTGS) x 100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	$=43.701 / 44.935 \times 100\% = 97,25\%$	97,25	97,25	Indikator Eselon III (Indikator Program)
3.1	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	Kuantitatif	100%	Jumlah data orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi dibagi jumlah DTGS dikali 100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	$8740/49.935 \times 100\% = 17,50\%$	17,50	17,50	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengetasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	8682 keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengetasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	Penerima bantuan dari pusat	8740 keluarga	100.67	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana	Kuantitatif	100%	(Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten)x100%	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	$=18/18 \times 100$	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)
4.1	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Kuantitatif	100%	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota	Kuantitatif	45 orang	Jumlah orang yang melaksanakan Koodinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	45 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

5	Taman Makam Pahlawan yang tertata	Kuantitatif	100%	Taman Makam Pahlawan yang tertata	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	$=1/1*100\%=100\%$	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)
5.1	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	Kuantitatif	100%	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi jumlah seluruh TMP	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	$=1/1*100\% = 100\%$	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/ kota	Kuantitatif	54 makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	55 Makam	101.85	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

2. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke 2. "Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan" ; Sasaran Strategis Ke 2. "Meningkatnya kualitas hidup perempuan"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kualitatif	46,35%	Persentase perempuan di Parlemen Pegawai, Pegawai Senior, Manager dan Pekerja Profesional dan Teknis	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	Data IDG masih tahun 2021 (Data IDG tahun 2022 belum keluar dari BPS)	53.02	114.39	Eselon II (IKU)
2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Kuantitatif	5,3	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Perempuan = ((Jumlah korban kekerasan) / (jumlah penduduk perempuan > 18 tahun)) x 10.000	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	$= 30/91.366 \times 10.000 = 3,28$	3,28	61,89	Eselon II (IKU)
1	Persentase ARG pada belanja langsung ARG	Kuantitatif	0,5%	(Jumlah anggaran yang serponsive gender seluruh PD / Jumlah anggaran APBD Kabupaten Belitung) x 100%	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	$= 347.468.708.361 / 971.844.385.804 \times 100\% = 35,75\%$	35,75%	7150%	Eselon III (Indikator Program)
1.1	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG	Kuantitatif	10 PD	Jumlah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	10 PD	100	Eselon III (Indikator Kegiatan)

	1	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	35 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	35 PD	100.00	
1.2		Terfasilitasinya organisasi perempuan	Kuantitatif	19 Organisasi	Jumlah Organisasi Perempuan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	19 Organisasi	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	19 Organisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi kelembagaan perempuan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	19 Organisasi	100.00	
1.3		Terfasilitasinya Forum Pusa Kabupaten Belitung	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

2	Persentase layanan perlindungan perempuan	Kuantitatif	100%	Jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor /jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan x 100%	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	$= 24 / 24 \times 100$	100	100.00	Eselon III (Indikator Program)
2.1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah layanan dibagi jumlah pengaduan dikali 100%	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	1 Lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	1 Dok	100.00	
2.2.	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Kuantitatif	3 Lembaga	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	1 lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Kuantitatif	37 Orang	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	24 Orang	64.86	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	11 Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	15 Layanan	136.36	
3	Persentase keluarga yang terlayani	Kualitatif	100%	(Jumlah keluarga yang terlayani / Jumlah keluarga yang memerlukan pelayanan) x 100%	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	$= 3/3 \times 100 = 100\%$	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)

3.1.	Lembaga keluarga yang dibina	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah keluarga yang dibina	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Lembaga	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	Kualitatif	25%	(Komponen data gender dan anak yang terpenuhi / Jumlah komponen data SIGA) x 100%	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	=24 / 43 x 100% = 55,8%	55,8	223,20	Eselon III (Indikator Program)
4.1.	Tersedianya data gender dan anak	Kualitatif	1 Dok	Jumlah data gender dan anak	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

3. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke-3. "Terpenuhinya Hak Anak"; Sasaran Strategis ke 3. "Meningkatnya kualitas hidup anak"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknik Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Pratama (83%)	KLA ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	Skor KLA dari Kementerian tahun 2022 : 581,52	58,15	70,06	Eselon II
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Kualitatif	4.6	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus = ((Jumlah anak yang memerlukan perlindungan) / (jumlah anak) x 10.000	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	$= (8 + 37 + 5) / 52.661 \times 10.000 = 9,5$	9,5	206,52	Eselon II
1	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Pratama	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA	Pratama	100.00	Eselon III (Indikator Program)
1.1.	Tercapainya peningkatan status KLA	Kualitatif	750 Point	Jumlah Skor status KLA Pratama	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA	581,52	77,54	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelebangan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebangan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kabupaten/kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1.2.	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Kuantitatif	1 Dok	Laporan Fasilitasi Forum anak Kabupaten Belitung	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Terkait Kabupaten	Kuantitatif	100%	$(\text{Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani} / \text{Jumlah korban kekerasan yang tercatat}) \times 100\%$	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	$= 8 / 8 * 100 = 100\%$	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)

2.1.	Tersedia layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan	Kuantitatif	100%	Jumlah layanan perlindungan anak ditingkat Desa/ kelurahan dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan dikali 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	49 Desa Kel / 49 Desa Kel x 100%	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah laporan pembinaan dan evaluasi PATBM	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	

Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan. "Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas" ; Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan daerah"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknik Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif	100	SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x 100%	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	86,98	86,98	Eselon II
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif	100	SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x 100%	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	86,98	86,98	Eselon II
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kualitatif	100	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Persentase dokumen yang telah dilaporkan dibagi persentase keseluruhan	Persentase dokumen yang telah dilaporkan dibagi persentase keseluruhan	100	100.00	Eselon III (Indikator Program)

1.1.	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kualitatif	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan terdiri dari renstra, renja induk, renja perubahan; dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	Dokumen perencanaan terdiri dari renstra, renja induk, renja perubahan; dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	6 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)	
	1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kuantitatif	3 Dok	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan Renja Perubahan	Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan Renja Perubahan	3 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitatif	3 Laporan	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	3 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1.2.	Dokumen keuangan perangkat daerah	Kuantitatif	3 Dok	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai di laporkan	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai dilaporkan	3 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)	
	1	Gaji dan tunjangan ASN	Kuantitatif	28 Orang	Gaji dan tunjangan ASN	Data gaji dan tunjangan pegawai sampai TW IV (Januari - Desember 2022)	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	28 Orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kuantitatif	2 Dok	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen terdiri dari laporan keuangan, laporan barang	dokumen terdiri dari laporan keuangan, laporan barang	2 Dok	100.00	
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kuantitatif	75%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Dokumen penilaian Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dan dibagikan oleh BKPSDM setiap tahunnya		78,70	104,93	Eselon III (Indikator Program)	
2.1.	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kuantitatif	57 orang	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	Data Kepegawaian DSPPPA	Pegawai ASN dan Non ASN	57 Orang	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)	
	1	Jumah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kuantitatif	1 paket	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai	Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai	1 Paket	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kuantitatif	100%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Pelayanan administrasi umum perkantoran dan administrasi jasa pelayanan umum perkantoran		100	100.00	Eselon III (Indikator Program)	
3.1.	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kuantitatif	100%	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum, sub kegiatan rutin sekretariat	Administrasi umum, sub kegiatan rutin sekretariat	100	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)	

1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kuantitatif	1 Paket	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		1 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kuantitatif	2 Paket	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		2 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kuantitatif	1 paket	Peralatan rumah tangga	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		1 paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Kuantitatif	2 Paket	Bahan logistik kantor	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		2 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
5	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kuantitatif	1 paket	Barang cetakan dan penggandaan	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		1 paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
6	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kuantitatif	1 Dok	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		1 Dok	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kuantitatif	12 Laporan	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data realisasi fisik sd. Desember 2022		12 Laporan	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3.2.	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kuantitatif	100%	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Data realisasi fisik sd. Desember 2022	Data realisasi fisik sd. Desember 2022 dibagi target dikali 100%	100%	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat, materai, perangko, dan pengiriman		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Jumlah laporan jasa layanan umum kantor yang disediakan	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa layanan umum kantor	Tenaga Non ASN Cleaning Service, Sopir dan Penjaga Malam		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kuantitatif	100%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Realisasi laporan fisik sd. Desember 2022		100	100.00	Eselon III (Indikator Program)

4.1.	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kuantitatif	100%	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kuantitatif	1 Unit	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Data dari PPK kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	1 unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4.2	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Kuantitatif	6 Jenis	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	6 Jenis	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kuantitatif	14 Unit	Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	Jumlah Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	14 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah mebel yang dipelihara	Kuantitatif	10 Unit	Mebeleur yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kuantitatif	25 Unit	Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	25 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Kuantitatif	1 Unit	Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

Tanjungpandan, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

Penjelasan cara pengisian format :

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/IKU sesuai Renstra/Perjanjian Kinerja
3. Kolom 3 : Diisi dengan jenis target yang akan dicapai bersifat kuantitatif atau kualitatif
4. Kolom 4 : Diisi target akhir tahun sesuai Renstra/Perjanjian Kinerja
5. Kolom 5 : Diisi dengan rumus/cara perhitungan/pengukuran indikator kinerja
6. Kolom 6 : Diisi dengan data kinerja yang akan digunakan dalam perhitungan/pengukuran kinerja sampai dengan triwulan tersebut
7. Kolom 7 : Diisi dengan cara perhitungan data kinerja yang menggunakan formulasi/rumus perhitungan
8. Kolom 8 : Diisi dengan realisasi pada masing-masing indikator sampai dengan triwulan tersebut
9. Kolom 9 : Diisi dengan persentase pencapaian target ($9 = 8/4$)
10. Kolom 10 : Diisi dengan memberi keterangan apabila pada triwulan tersebut indikator kinerja belum tercapai

FORM 1 : LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategi	IKU/Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Kinerja Triwulan IV		Program/ Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	
				Capaian	%		Pagu Anggaran	Yang digunakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	86.98	86.98			
	Meningkatnya kualitas pelayanan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	86.98	86.98	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5,500,191,063	5,150,803,728
						Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	6,000,000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,575,393,613	4,313,635,384
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,572,393,613	4,310,635,584
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,000,000	2,999,800
						Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18,150,000	18,131,850

								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18,150,000	18,131,850
								Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	342,836,050	341,976,400
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	6,999,500
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,434,800	56,049,600
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,000,000	13,997,800
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103,061,250	102,890,000
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,700,000	43,699,500
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,640,000	5,340,000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113,000,000	113,000,000
								Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	42,385,100	37,125,000
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42,385,100	37,125,000
								Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228,484,300	220,529,716
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	1,683,400
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,400,000	52,955,316

							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,084,300	165,891,000
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286,942,000	213,405,378
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208,750,000	139,323,778
							Pemeliharaan Mebel	3,000,000	2,240,000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,640,000	18,486,600
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53,552,000	53,355,000
		Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Tahunan	0.5	0.96	192			
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	98.79	123.49			
							Program Pemberdayaan Sosial	3,887,579,047	2,273,292,575
							Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	3,887,579,047	2,273,292,575
							Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	151,205,985	129,669,465
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3,536,713,017	1,962,453,360

							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	121,340,450	112,043,250
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	78,319,595	69,126,500
							Program Rehabilitasi Sosial	559,157,040	473,578,624
							Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	490,180,600	462,154,917
							Penyediaan Permakanaan	219,138,700	216,277,703
							Penyediaan Alat Bantu	40,572,000	36,049,600
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	143,939,050	140,531,750
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	86,530,850	69,295,864
							Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	68,976,440	11,423,707
							Penyediaan Permakanaan	6,993,000	2,447,500
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	15,000,000	-
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	46,983,440	8,976,207

								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	426,311,650	420,185,855
								Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	426,311,650	420,185,855
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	426,311,650	420,185,855
								Program Penanganan Bencana	445,395,900	402,359,450
								Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	445,395,900	402,359,450
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	445,395,900	402,359,450
								Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	6,721,660	3,584,560
								Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6,721,660	3,584,560
								Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6,721,660	3,584,560
		Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46.35	53.02	114.39				
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5.3	3.28	61.89				
								Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	850,033,630	324,257,269

								Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	21,434,480	21,384,012
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	5,929,680	5,901,050
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15,504,800	15,482,962
								Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	814,270,500	288,553,107
								Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	529,584,725	17,709,300
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	284,685,775	270,843,807
								Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	14,328,650	14,320,150

							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	14,328,650	14,320,150
							Program Perlindungan Perempuan	222,633,055	191,942,025
							Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	28,875,288	27,558,200
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	28,875,288	27,558,200
							Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	193,757,767	164,383,825
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	126,767,100	116,983,825
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	66,990,667	47,400,000

								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	27,260,825	23,228,225
								<i>Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	27,260,825	23,228,225
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/ Kota	27,260,825	23,228,225
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	41,827,420	37,225,856
								<i>Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	41,827,420	37,225,856
								Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	41,827,420	37,225,856
		Terpenuhinya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	83%	58.15	70.06				
		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4.6	9.5	206.52				
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	190,401,171	184,599,426

								Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	11,828,383	10,757,151
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11,828,383	10,757,151
								Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	178,572,788	173,842,275
								Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	178,572,788	173,842,275
								Program Perlindungan Khusus Anak	26,336,995	25,068,675
								Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26,336,995	25,068,675

								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,635,195	19,110,825
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,701,800	5,957,850
TOTAL									12,183,849,456	9,510,126,268

Tanjungpandan, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

Penjelasan cara pengisian format :

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi sasaran strategis sesuai Renstra/Perjanjian Kinerja
3. Kolom 3 : Diisi Indikator Kinerja/IKU sesuai Renstra/Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 : Diisi Target tahun berjalan
5. Kolom 5 : Diisi (akumulasi) capaian kinerja pada triwulan bersangkutan sesuai hasil perhitungan kolom 8 pada Form Pengukuran Kinerja
6. Kolom 6 : Diisi Persentase kinerja pada triwulan bersangkutan sesuai hasil perhitungan kolom 9 pada Form Pengukuran Kinerja
7. Kolom 7 : Diisi Program/Kegiatan sesuai dengan sasaran strategis sesuai Renstra/Perjanjian Kinerja
8. Kolom 8 : Diisi besaran pagu anggaran yang digunakan pada tahun tersebut
9. Kolom 9 : Diisi (akumulasi) realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan bersangkutan

Catatan : Gambaran masing-masing Capaian Kinerja sebagaimana penjelasan pada Lembar Pengukuran dan penjelasan capaian kinerja berikut sebagai satu kesatuan pelaporan

PAGU

REALISASI

5,735,675,363

5,378,332,944

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Lampiran II
 Nomor :
 Tanggal :

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
 TRIWULAN IV

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Rumus	Target 2020	Triwulan IV		Ket.	Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket.	Penanggung jawab
					Realisasi	%				Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1 Indeks Pembangunan Manusia		71.87									
		2 Angka Kemiskinan		6.85%									
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup		70,6 tahun				1 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	605,757,000.00				Dinkes
								2 Upaya Pelayanan Kesehatan	63,983,955,462.00			Dinkes	
								3 Peningkatan Konsumsi dan keamanan pangan	172,942,500.00			DKPP	
								4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,599,580,020.00			Dinkes	
								5 Upaya Kesehatan Masyarakat	1,570,981,000.00			Dinkes	
								6 Upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	85,341,779,983.00			Dinkes	
								7 Penyediaan dan pengelolaan air minum	10,879,933,000.00			DPUPR	
								8 pembangunan infrastruktur pemukiman	11,989,160,000.00			DPUPR	
								9 penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	2,352,650,000.00			DPUPR	
								10 Pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2,062,530,000.00			DPPKBPMMD	
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah		8,15 tahun				1 Pendidikan Anak Usia Dini	8,903,769,000.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	52,548,391,100.00				
								3 Pendidikan Non Formal	6,483,316,000.00				
								4 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1,996,024,500.00				
								5 Manajemen Pelayanan Pendidikan	123,524,000.00				
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita		13.496.000 rupiah				1 Peningkatan kesempatan kerja	447,595,000.00				DKUKMPTK
								2 Pelayanan pendidikan masyarakat miskin/tidak mampu	4,135,135,000.00			DKUKMPTK	
								3 Pemberdayaan Sosial	3,887,579,047.00	2,273,292,575	58.48%	DPPPAS	
								4 Rehabilitasi Sosial	559,157,040.00	473,578,624	84.70%	DPPPAS	
								5 Perlindungan dan Jaminan Sosial	426,311,650.00	420,185,955	98.56%	DPPPAS	
								6 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	412,950,000.00			BPBD	

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Rumus	Target 2020	Triwulan IV		Ket.	Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket.	Penanggung jawab
					Realisasi	%				Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status desa "Maju"		20 Desa				1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	787,564,000.00			DPPKBPM
								2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,421,005,000.00			DPPKBPM
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		B									
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		WTP B				1	Pengelolaan perencanaan keuangan daerah	587,667,000.00			BPKAD
								2	Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	237,410,000.00			BPKAD
								3	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	176,838,000.00			BPKAD
								4	peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah	1,075,675,000.00			BPKAD
								5	peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD)	1,615,139,200.00			BPKAD
								6	Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	497,127,200.00			BPPRD
								7	perencanaan pembangunan daerah	661,515,000.00			BAPPEDA
								8	Perencanaan Pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	160,799,500.00			BAPPEDA
								9	Perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan	409,700,000.00			BAPPEDA
								10	Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	258,225,000.00			BAPPEDA
								11	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,930,457,000.00			INSPEKTORAT
								12	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah	109,810,000.00			
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN		77				1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,171,018,000.00			BKPSDM
								2	Pembinaan dan pengembangan aparatur	1,200,676,000.00			BKPSDM
								3	Penataan manajemen SDM aparatur	2,419,630,000.00			BKPSDM
								4	Peningkatan kompetisi sumber daya aparatur perangkat daerah	5,105,792,500.00			BKPSDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Rumus	Target 2020	Triwulan IV		Ket.	Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket.	Penanggung jawab	
					Realisasi	%				Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat		83				1	Penataan kelembagaan	213,750,000.00				SETDA
								2	Layanan pengadaan barang dan jasa	2,706,430,000.00				SETDA
								3	Penataan peraturan perundang-undangan	331,335,000.00				SETDA
								4	Penataan administrasi kependudukan	1,276,005,500.00				DISDUKCAPIL
								5	pengelolaan aplikasi informatika	7,865,500,000.00				DISKOMINFO
								6	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	805,155,000.00				DISKOMINFO
								7	Penyelenggaraan statistik sektoral	185,540,000.00				DISKOMINFO
								8	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	667,836,000.00				BPBD
								9	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	860,318,000.00				BPBD
								10	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3,121,463,300.00				SATPOLPP
								11	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	489,695,000.00				KECAMATAN
								12	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	733,473,884.00				DKUKMPTK
								13	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan	327,027,500.00				DKPP
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5.63%										
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)		600.000 orang				1	Pengembangan destinasi pariwisata	8,891,403,000.00				DISPAR
								2	Pemasaran pariwisata	6,601,207,500.00				DISPAR
								3	Pengembangan SDM, kelembagaan dan industri pariwisata	1,121,485,000.00				DISPAR
								4	Pengembangan ekonomi kreatif	1,922,485,500.00				DISPAR
								5	Pengembangan nilai budaya	6,037,981,000.00				DISPAR
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB		27.31%				1	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	1,051,877,500.00				DKPP
								2	Pengembangan tanaman perkebunan	299,150,000.00				DKPP
								3	Pengembangan peternakan dan kesehatan hewan	267,872,500.00				DKPP
								4	Peningkatan pelayanan teknis perbenihan dan perbibitan	1,058,482,150.00				DKPP

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Rumus	Target 2020	Triwulan IV	Ket.	Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	Ket.	Penanggung
-----	-------------------	-------------------	-------	-------------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Realisasi (6)	% (7)	(8)	(9)	(10)	Realisasi (11)	% (12)	(13)	jawab (14)
								5	Pengembangan prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian	895,607,500.00			DKPP
								6	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	5,702,990,000.00			DPUPR
								7	Pengembangan perikanan tangkap	6,029,886,000.00			DINAS PERIKANAN
								8	pengembangan perikanan budidaya	1,684,863,000.00			DINAS PERIKANAN
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	a. Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)		93,880,774				1	Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro	512,010,000.00			DKUKMPTK
		b. Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)		1,286,792,500				2	Pengembangan koperasi	435,205,000.00			DKUKMPTK
								3	Pemasaran produk usaha koperasi dan usaha mikro	603,985,000.00			DKUKMPTK
								4	Pembinaan dan pengembangan pasar	200,000,000.00			DKUKMPTK
14	Meningkatnya investasi	Nilai investasi (juta rupiah)		1,780,878				1	Peningkatan promosi dan iklim investasi	1,016,212,500.00			DPMPTSP
								2	Pelayanan perizinan dan non perizinan	425,688,500.00			DPMPTSP
								3	Pengendalian dan pengawasan investasi	30,000,000.00			DPMPTSP
								4	Penataan struktur industri	52,650,000.00			DPMPTSP
								5	Pengembangan industri kecil dan menengah	573,400,000.00			DPMPTSP
								6	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	14,600,000.00			DPMPTSP
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan		46.25%				1	Pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	90,222,664,000.00			DPUPR
								2	Peningkatan dan pengembangan turap/talud/brojong	500,000,000.00			DPUPR
								3	Pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase sekunder	3,000,000,000.00			DPUPR
								4	Perencanaan tata ruang	1,600,485,850.00			DPUPR
								5	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	116,004,500.00			DPUPR
								6	Pengelolaan sumber air baku	208,000,000.00			DPUPR
								7	Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	14,231,644,000.00			DISHUB
								8	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi transportasi	1,514,443,000.00			DISHUB
								9	Peningkatan pelayanan transportasi darat	1,130,350,000.00			DISHUB
								10	Pengembangan transportasi laut	20,356,870,000.00			DISHUB
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		62.73				1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,867,546,250.00			DLH
								2	Pengembangan dan penataan taman	2,015,999,900.00			DPUPR
17	Meningkatnya pengelolaan sampah	Rasio layanan pengelolaan sampah		4.20%				1	Peningkatan pengelolaan persampahan	7,984,502,500.00			DLH



FORM 3 : ANALISIS KINERJA

**PENJELASAN CAPAIAN KINERJA OPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

1. Penjelasan Capaian Kinerja Tujuan 1. "Meningkatnya Kesejahteraan PMKS" ; Sasaran Strategi Ke-1. "Meningkatnya penanganan PMKS"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial/ PMKS)
		- Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		- Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan dibagi jumlah PMKS seluruhnya dikali 100%
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Sudah sesuai target yang direncanakan
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	Kinerja saat ini sudah menggunakan Non Tunai, sehingga lebih mudah pengukuran realisasi program dibandingkan tahun sebelumnya yang masih manual
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Pelaksanaan program/kegiatan sudah terintegrasi dengan instansi terkait
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Terpenuhinya kebutuhan, tersalurkannya bantuan kepada PMKS
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS

2. Penjelasan Capaian Kinerja Tujuan ke 2. "Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan" ; Sasaran Strategi Ke-2. "Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah sedangkan indikator sasaran adalah hasil dari pencapaian beberapa outcome/indicator program. Rumusan operhitungan adalah hasil akhir dibagi rencana dikalikan 100 %
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Kinerja nyata adalah kinerja yang telah dilaksanakan sedangkan kinerja yang direncanakan adalah kinerja yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya adalah perbandingan kinerja yang benar benar telah berjalan dibandingkan dengan kinerja yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Adalah perbandingan kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang memiliki kesamaan program dan kegiatan.
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Output program dan kegiatan adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek sedangkan outcome hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan. Penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran yang digunakan dalam suatu kegiatan
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Factor factor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Factor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

3. Penjelasan Capaian Kinerja Tujuan ke-3. "Terpenuhinya Hak Anak" ; Sasaran Strategi Ke-3. "Terpenuhinya Hak Anak"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Sasaran : " Peningkatan Skor Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Indikator Kinerja : Predikat Kabupaten Layak Anak. Rumusan Perhitungan : Skor Evaluasi KLA.
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Persiapan pelaksanaan Evaluasi KLA Kabupaten Belitung dengan menghimpun data akan tetapi pelaksanaan Evaluasi KLA Nasional ditiadakan dikarenakan pandemi Covid-19.
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	Persiapan pelaksanaan Evaluasi KLA telah dilaksanakan dengan menghimpun data dari OPD dan Stakeholder terkait dengan pemenuhan hak anak, akan tetapi tahun ini dikarenakan situasi pandemic Covid-19, maka evaluasi KLA ditiadakan.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Koordinasi, fasilitasi, advokasi tentang pemenuhan hak anak terus dilakukan kepada OPD, Media Massa, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Terpenuhinya percepatan pemenuhan hak anak sesuai dengan 24 indikator Kabupaten Layak Anak, tercapainya peningkatan skor evaluasi Kabupaten Layak Anak.
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Komitmen dan Sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan instansi terkait pemenuhan hak anak.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Data yang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan/ kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada Stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

4. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ke-3. "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah sedangkan indikator sasaran adalah hasil dari pencapaian beberapa outcome/indikator program. Rumusan perhitungan adalah hasil akhir dibagi rencana dikalikan 100%
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Kinerja nyata adalah kinerja yang telah dilaksanakan sedangkan kinerja yang direncanakan adalah kinerja yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya adalah perbandingan kinerja yang benar benar telah berjalan dibandingkan dengan kinerja yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Adalah perbandingan kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang memiliki kesamaan program dan kegiatan.
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Output program dan kegiatan adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek sedangkan outcome hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan. Penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran yang digunakan dalam suatu kegiatan.
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Factor factor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Factor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai dan penyediaan peralatan pendukung yang baik.

Tanjungpandan, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004